RINGKASAN EKSEKUTIF

Menata Perubahan
Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

Pencapaian Kinerja Pembangunan
KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014)

REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menata Perubahan
Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

Pencapaian Kinerja Pembangunan
KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014)

REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menata Perubahan Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan
Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014)

Hak Cipta @ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

ISBN : 978-979-3764-93-1

Akses melalui : www.bappenas.go.id www.facebook.com/bappenas www.twitter.com/bappenas

Kritik dan Saran : ekp@bappenas.go.id
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Bismilllahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, saya menyambut gembira terbitnya buku mengenai pencapaian kinerja pembangunan di masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Pertama Tahun 2004-2009 dan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua Tahun 2009-2014. Buku yang diberi judul *"Menata Perubahan; Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan"*, dan diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berisi catatan-catatan penting beserta capaian yang dapat diraih selama masa pemerintahan yang saya pimpin. Tentu saja buku ini bukanlah bermaksud untuk menonjolkan capaian kinerja pemerintahan semata, tetapi sesungguhnya merupakan catatan dan gambaran yang utuh dalam masa dua periode pemerintahan. Hal-hal yang baik tentu dapat dilanjutkan oleh pemerintahan pengganti saya, namun jika ada hal-hal yang kurang pada tempatnya tentu perlu dievaluasi dan dikoreksi.

Kita semua menyadari, bahwa proses pembangunan adalah jalan panjang yang penuh onak dan duri. Kadang dipenuhi oleh tantangan yang tidak ringan, bahkan datang tanpa diduga. Namun, sebagai sebuah proses sejarah yang berkelanjutan, kita harus menghadapinya demi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kita semua mengetahui, sejak Indonesia merdeka, proses pembangunan sudah dilaksanakan dengan berbagai dinamikanya. Pemerintahan pendahulu saya telah berbuat yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kita sesuai dengan zamannya. Saya berkewajiban untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu saya yang sejalan dengan amanat konstitusi. Di tengah era reformasi dan demokrasi yang terus tumbuh, di era keterbukaan pers dan media yang semakin mengemuka, serta berbagai persoalan yang datang silih berganti, selama hampir sepuluh tahun pemerintahan yang saya pimpin. *Alhamdulillah,* dapat menjalankan roda pemerintahan pada arah yang sejalan dengan amanat konstitusi.

Jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dan Kedua, telah berupaya menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membangun kualitas Sumber Daya Manusia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dibarengi upaya memelihara pembangunan berkelanjutan serta berbagai upaya untuk mengembangkan dan memeratakan pembangunan di daerah-daerah di seluruh tanah air.

Kita juga bersyukur sistem politik saat ini telah semakin demokratis, pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan, prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang semakin membaik, penghasilan masyarakat yang terus meningkat, serta kesejahteraan rakyat yang terus membaik. Di sisi lain, harus saya akui masih ada persoalan yang memerlukan perhatian dan kerja keras seperti pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum, serta upaya membangun konektivitas antar daerah yang masih harus terus dilanjutkan.

Sebagaimana kata pepatah "tak ada gading yang tak retak". Saya menyadari, meskipun di satu sisi banyak capaian yang sudah berhasil diraih, tetapi di sisi lain tentu masih ada berbagai persoalan yang masih harus kita selesaikan. Demikian pula, tantangan di masa depan tidaklah semakin ringan. Namun, dengan kebersamaan---"ringan sama dijinjing, berat sama dipikul"---dari segenap komponen bangsa, semuanya itu insya Allah dapat kita lalui dengan selamat. Setiap tantangan dapat kita jadikan sebagai peluang untuk melangkah lebih maju lagi. Kita harus yakin dan percaya---pada saatnya nanti---dengan kesungguhan, kegigihan, semangat yang tinggi, disertai optimisme yang kuat, bangsa dan negara kita dapat tampil sebagai bangsa dan negara terkemuka di dunia.

Akhirnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dan Kedua atas kerja keras dan kebersamaan yang ditunjukkan selama pengabdian saudara-saudara hampir satu dekade ini. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah menyusun buku yang baik ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa meridhoi gerak langkah dan upaya kita demi kemajuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat diseluruh tanah air.

Terima kasih.

Jakarta, Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menjalankan amanat Konstitusi sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945, untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, Kabinet Indonesia Bersatu Pertama (masa bakti tahun 2004 – 2009) dan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (masa bakti tahun 2009 - 2014) menetapkan agenda pembangunan yang pada garis besarnya ditujukan untuk mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Indonesia yang Adil dan Demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan pembangunan selama masa bakti KIB I dan KIB II mencatat berbagai kemajuan yang berarti dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang digariskan dalam agenda pembangunan, tanpa menutup kenyataan bahwa beberapa pencapaian mengalami kemajuan yang lambat dan perlu dipercepat pada masa pembangunan berikutnya.

Secara ringkas, rincian pencapaian pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dan Kedua dalam keseluruhan masa bakti 2004 – 2014 dirinci dalam lima aspek pokok, yaitu: penguatan landasan pembangunan yang kokoh, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat, keberlanjutan pembangunan, serta pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah.

PENYIAPAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH

Pemantapan Demokrasi

1. Kehidupan demokrasi dalam masa KIB I dan II terus berkembang. Kebebasan sipil di Indonesia memiliki ruang yang cukup untuk berkembang meskipun kinerja demokrasi di Indonesia masih tergolong sedang (*medium performing democracy*). Kinerja lembaga demokrasi juga semakin baik. Jaminan terhadap hak-hak politik warga mendatang perlu ditingkatkan dan lembaga demokrasi masih perlu terus diperkuat.

Gambar 1
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2009-2012

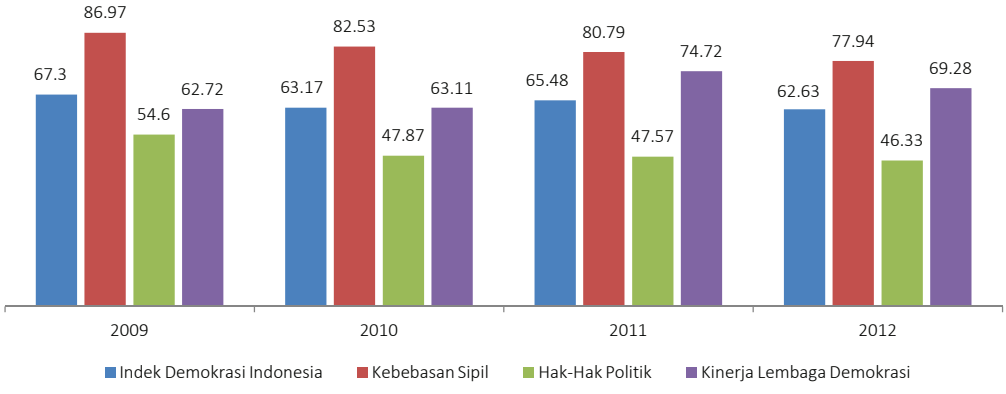

Sumber: Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS, UNDP-IDI 2010-2011, 2012, dan 2013

2. Partisipasi politik semakin meningkat antara lain tercermin dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden pada tahun 2009 secara jujur adil, demokratis, aman, dan damai dengan angka partisipasi politik rakyat mencapai di atas 70 persen. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 perlu lebih baik dengan meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu ketersediaan daftar pemilih tetap (DPT), serta pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang melibatkan kemitraan dengan penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil.

3. Capaian penting lainnya bagi keutuhan NKRI adalah terselesaikannya konflik Aceh melalui perjanjian Helsinki yang kemudian diikuti dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya dalam rangka penyelesaian masalah/konflik sosial di kalangan masyarakat dilakukan pelembagaan dialog antara lain dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Di samping itu, dilakukan fasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK). Selain itu, salah satu aksi penting dalam mendukung Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri adalah dihasilkannya Nota Kesepahaman Bersama 10 Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelesaian konflik secara damai dalam hal terjadi gangguan keamanan dalam negeri.

4. Dalam hal kebebasan pers, menurut *Freedom House* periode 2003- 2012 Indeks Kebebasan Pers di Indonesia menunjukkan rating yang semakin membaik. Saat ini, tingkat kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya bebas (*partly free*) dilihat dari kategori penilaian yang meliputi aspek hukum, politik, dan ekonomi.

Gambar 2
Skor Indeks Kebebasan Pers Indonesia Tahun 2003-2012

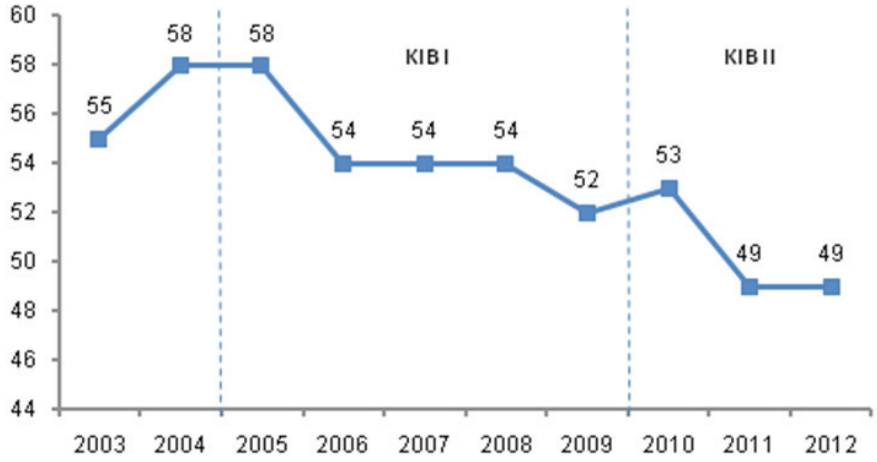

Keterangan: 0- 3 free, 31-60 partly free, 61- 100 not free
Sumber: *Freedom of Pers* 2013

5. Keterbukaan informasi publik terus didorong. Sejak berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2010, pembentukan PPID di seluruh badan publik di Indonesia baik di pusat maupun daerah. Ruang kebebasan pers yang sangat besar perlu diimbangi dengan kebijakan untuk memperbanyak akses dan pilihan sumber informasi masyarakat.

Penegakan Hukum yang Berkeadilan

6. Pembangunan hukum terus didorong. Kinerja lembaga hukum ditingkatkan melalui transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di lembaga peradilan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap proses pengelolaan perkara serta data putusan nasional yang memuat semua putusan pengadilan. Sedangkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum dilakukan dengan pembenahan manajemen SDM aparatur penegak hukum melalui proses rekrutmen aparatur penegak hukum yang lebih transparan, peningkatan program diklat, serta peningkatan kesejahteraan aparatur penegak hukum.

7. Dalam upaya meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, Pemerintah melakukan ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, diantaranya kovenan ECOSOC (*Economic and Social Council) dan ICCPR (Internasional Convention on Civil and Political Rights*), konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination all Forms of Discrimination Againts Women*) dan komitmen ke depan untuk meratifikasi rekomendasi UPR (*Universal Periodic Review*) dan *Optional Protocol* CEDAW.

8. Dalam kurun waktu 2010-2012 pemerintah telah melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin berupa pembebasan biaya perkara pelaksanaan sidang keliling, dan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di setiap pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi terus ditingkatkan. Sebagai komitmen untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi telah ditetapkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dilanjutkan dengan penetapan UU No. 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCAC. Tindak lanjut yang signifikan pasca ratifikasi UNCAC adalah diterbitkannya Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang merupakan langkah strategis dalam mensinergikan upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat pusat dan daerah.

Gambar 3
Perkembangan Skor IPK Indonesia Tahun 2004 - 2013

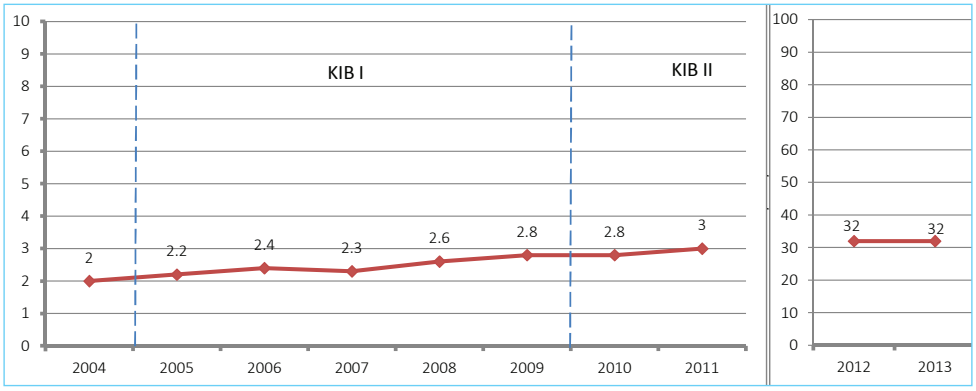

Keterangan:
Skala 0-10, 0 (terkorup) – 10 (terbersih)
Sumber: Transparency International, 2013

Keterangan:
Tahun 2012 terjadi perubahan skala.
Skala 0-100, 0 (terkorup) – 100 (terbersih)

10. Upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum telah menunjukkan capaian signifikan. Ini dapat dilihat dari penyelamatan dan pemulihan keuangan negara oleh lembaga penegak hukum baik dari Kejaksaan maupun KPK, serta telah tersusunnya *roadmap* jangka menegah dan jangka panjang Stranas PPK.

Tabel 1
Data Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan oleh KPK (Juta Rupiah)

No	Kegiatan	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kasus TPK	6.944	12.771	45.563	407.891	142.994	189.371	134.907	119.134	118.847
2	Kasus Gratifikasi	15	219	2.892	3.909	1.288	3.060	3.155	2.521	1.509

Sumber: KPK, Per Nopember 2013

11. Dalam rangka meningkatkan sinergitas regulasi dan kebijakan pembangunan, telah disahkan 194 UU yang 76 UU diantaranya tertuang dalam prolegnas 2005-2009. Sementara pada KIB II telah disahkan 83 UU yang 44 UU diantaranya sesuai dengan RUU prolegnas 2010-2014. Dengan capaian tersebut, negara tetap berperan penting sebagai regulator.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

12. Reformasi birokrasi terus ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, penguatan kualitas pengelolaan keuangan negara, peningkatan kualitas SDM aparatur, penerapan manajemen berbasis kinerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional.

13. Peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan terbitnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009; pembentukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan pelayanan publik; penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)/*One Stop Services* (OSS); dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di berbagai bidang.

14. Kualitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat ditunjukkan dengan membaiknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 yang diterbitkan BPK, K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 74 persen, pemerintah provinsi 61 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 24,9 persen.

Gambar 4
Perkembangan Opini BPK atas LKK dan LKPD Tahun 2007-2013

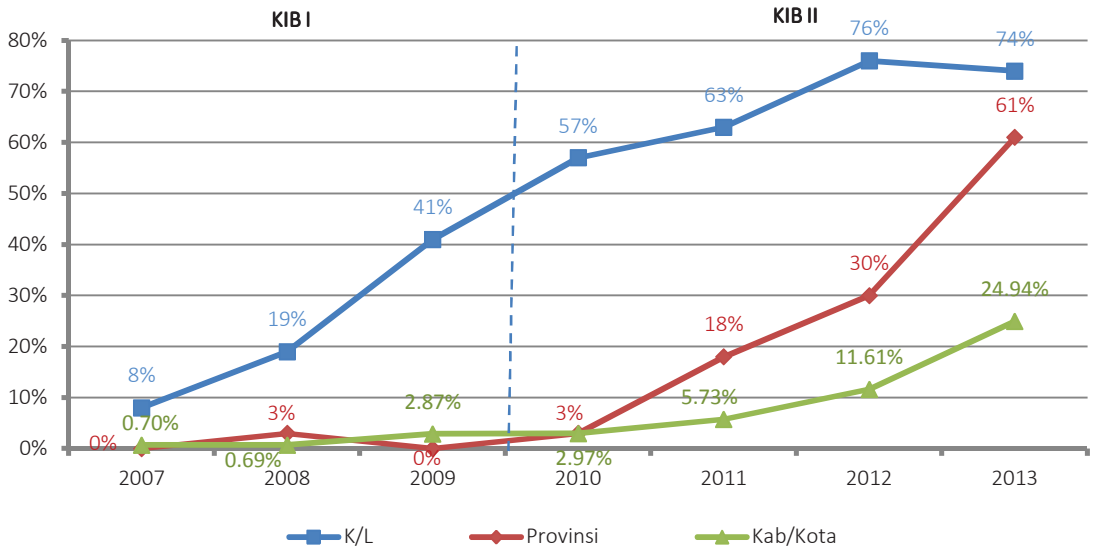

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), IHPS 2009-2013

15. Terkait dengan penerapan manajemen berbasis kinerja, pemerintah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui SAKIP, instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau *outcome* yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kinerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik.

16. Sejak penerapan reformasi birokrasi pada tahun 2007, sampai tahun 2013 sebanyak 59 K/L telah melaksanakan reformasi birokrasi. Kualitas dan efektivitas pelaksanaannya terus ditingkatkan, diantaranya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka penerapan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), survei kepuasan internal dan eksternal K/L dan mendorong penerapan *quick wins* K/L.

Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional

17. Pembangunan pertahanan dan keamanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional tercermin dari tercapainya pemenuhan Alutsista TNI menuju kekuatan pokok minimum/ *minimum essential force* (MEF), menguatkan peran industri pertahanan, meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dan anggota Polri, meningkatkan pertahanan di wilayah perbatasan, meningkatkan kualitas pelayanan Polri, menguatkan kelembagaan dan dukungan pelaksanaan P4GN, serta menanggulangi ancaman terorisme.

18. Modernisasi Alat Utama Sistem Senjata melalui pemenuhan MEF merupakan bagian yang penting dari upaya membangun kapasitas pertahanan. Pada KIB I, pembangunan MEF difokuskan pada pengisian celah kebutuhan (*filling the gap*) dan penggantian alutsista yang sudah tidak dapat berfungsi (*phase out*). Helikopter serbu MI-35, Meriam 105 tarik, Kapal korvet kelas Sigma, persenjataan Marinir, pesawat tempur Sukhoi SU-27 dan SU-30, pesawat angkut Hercules C-130 yang telah diupgrade, dan radar merupakan sebagian Alutsista yang diakuisisi pada periode pemerintahan KIB I. Selanjutnya, pada KIB II pembangunan MEF lebih difokuskan untuk meningkatkan daya gentar (*deterrent effect*) agar kekuatan pertahanan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan posisi tawar Indonesia.

19. Pemberdayaan industri pertahanan sebagai salah satu pilar penting dalam pertahanan negara ditingkatkan. Capaian menonjol dari kebijakan pemberdayaan industri pertahanan diantaranya pada periode KIB I, PT. Pindad membangun Panser APS (Angkut Personel Sedang) Anoa 6 x 6. Sementara untuk industri perkapalan nasional dilakukan melalui pembangunan dua *Landing Platform Dock* (LPD) oleh PT PAL Indonesia yang dilaksanakan bekerjasama dengan industri pertahanan Korea Selatan. Sejumlah peraturan perundang-undangan juga telah dikeluarkan sebagai upaya meningkatkan peran industri pertahanan nasional.

20. Dari aspek profesionalisme prajurit TNI dan anggota Polri, beberapa capaian penting diantaranya adalah dilaksanakannya operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), serta latihan dengan pihak asing secara periodik. Disamping itu, pada tahun 2013 pemerintah menetapkan kebijakan percepatan pemenuhan perumahan prajurit TNI di wilayah-wilayah strategis, diantaranya di Jakarta dan Bandung. Dikaitkan dengan aspek kesejahteraan, sebagai landasan pembangunan profesionalisme prajurit TNI dan Polri, pada tahun 2011 pemerintah menetapkan kebijakan sistem remunerasi kepada TNI dan Polri sebagai bentuk apresiasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri.

21. Pemeliharaan keamanan di wilayah perbatasan terus ditingkatkan dengan membangun pos-pos perbatasan di daerah perbatasan darat maupun laut. Sampai dengan tahun 2013, telah dibangun 25 pos perbatasan darat dan sejumlah pos perbatasan di 12 pulau kecil terluar.

22. Menguatnya kelembagaan dan dukungan pelaksanaan P4GN ditunjukkan dengan terbangunnya 97 panti rehabilitasi yang dikelola pemerintah, 177 panti rehabilitasi yang dikelola masyarakat, 182 instansi wajib lapor Kemkes, dan 40 instansi wajib lapor Kemsos.

23. Penanggulangan terhadap aksi terorisme terus ditingkatkan ditandai dengan tertangkapnya 905 orang tersangka terorisme dalam kurun waktu 2002-2013. Selain itu, satgas penindakan melakukan upaya pendekatan dan pencerahan kepada berbagai tokoh perorangan dan tokoh kelompok, serta organisasi kemasyarakatan yang berpotensi radikal. Selanjutnya sampai dengan triwulan III tahun 2013, telah dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) pada 21 provinsi, dan akan dibentuk di 5 provinsi pada tahun 2014 yang akan datang.

Kepemimpinan Indonesia dalam Percaturan Internasional

24. Meningkatnya peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN terlihat dari sejumlah capaian kebijakan yang diterapkan di wilayah ASEAN. Lahirnya *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) yang telah disahkan pada KTT ASEAN ke17 di Hanoi, *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR), dan ASEAN *Convention on Counter Terrorism* adalah beberapa prakasa yang digagas oleh Indonesia pada masa keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011. Di kawasan ASEAN, Indonesia perlu terus membangun pemahaman dan kesiapan publik untuk menghadapi Komunitas ASEAN 2015 agar memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan nasional. Indonesia juga berkepentingan untuk terus mendorong negara-negara ASEAN agar memiliki kesamaan pandangan mengenai Laut China Selatan.

25. Partisipasi indonesia dalam misi pemeliharaan dunia semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah personil yang dikirim oleh Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pada tahun 2013, Indonesia mengirim sebanyak 1.815 personil. Di tingkat multilateral, Indonesia perlu terus konsisten menyampaikan inisiatif mengenai *intermediate approach* yang dapat menyediakan jalan tengah di PBB.

26. Indonesia terus memajukan HAM dan demokrasi di dunia internasional. Pada masa KIB I, Indonesia secara konsisten mendukung upaya penguatan mekanisme HAM PBB sekaligus menjadi *founding member* dan anggota Dewan HAM PBB. Dalam masa KIB II, Indonesia juga melakukan berbagai langkah konkrit lainnya seperti menjalani *Universal Periodic Review* (UPR) di Dewan HAM PBB untuk kedua kalinya pada tahun 2012 dan menetapkan generasi ketiga Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang diharapkan dapat menjadi agenda

HAM nasional hingga tahun 2014. Penyelenggaran *Bali Democracy Forum* secara berkala merupakan salah satu cara Indonesia untuk memperkuat dan memperluas identitas sebagai negara demokrasi.

27. Terkait pemajuan HAM, Pemerintah Indonesia perlu mengambil kesempatan untuk menjelaskan berbagai langkah dan kebijakan yang telah diambil dan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengatasi masalah-masalah HAM di Indonesia. Di bidang demokrasi, Indonesia perlu memformulasikan mekanisme untuk membantu negara-negara yang kini sedang mengalami transisi demokrasi melalui forum *sharing of experiences and best practices* di bidang perdamaian dan demokrasi sejalan dengan upaya untuk menguatkan kapasitas dan kelembagaan demokrasi di dalam negeri.

28. Perlindungan pemerintah terhadap WNI di luar negeri ditingkatkan antara lain ditunjukan dengan repatriasi berskala besar, meliputi : (a) repatriasi WNI terkait dengan konflik politik yang terjadi serentak di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah (*Arab Spring*), sebanyak 10.413 WNI/TKI; (b) WNI korban gempa bumi di Jepang sebanyak 252 WNI; (c) WNI *overstayers* dari Arab Saudi sejak tahun 2005 hingga 2012 mencapai 136.903, dan (d) WNI yang terjebak dalam konflik politik di Suriah dan berhasil dipulangkan sebanyak 6.684 orang. Pemerintah telah membebaskan 135 dari 140 orang ABK WNI yang disandera dalam kasus pembajakan kapal di perairan Somalia. Upaya penguatan perlu dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri dengan meningkatkan koordinasi yang efektif, didukung oleh sinergi penggunaan data WNI/TKI di berbagai Kementerian/Lembaga.

29. Indonesia juga berperan sangat aktif dalam diplomasi ekonomi. Berbagai inisiatif diajukan oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan global. Beberapa diantaranya adalah menjadi salah satu inisiator peningkatan kerja sama anti korupsi di APEC (tahun 2004); mendorong peningkatan peran petani dalam pencapaian ketahanan pangan melalui kesepakatan *APEC Road Map on Food Security 2020*; serta pembentukan *APEC Framework on Connectivity* yang terdiri dari 3 pilar, yaitu konektivitas fisik, konektivitas institusional dan konektivitas *people-to-people*.

30. Dalam hubungan bilateral, organisasi internasional, dalam pencapaian MDGs, serta dalam perumusan agenda pembangunan pasca 2015, Indonesia telah menunjukan partsipasi yang penting, diantaranya adalah perjanjian kerja sama strategis antara Indonesia dan 14 negara mitra utama, yaitu Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Brazil, RRT, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Jerman, India, Turki, Perancis, Inggris, Viet Nam, dan 1 organisasi regional Uni Eropa. Indonesia juga telah mendorong pencapaian target MDGs melalui kerja sama internasional dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dipercaya sebagai salah satu *co-chairs UN Secretary-General High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda*.

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Peningkatan Fundamental Ekonomi dan Sektor Riil

31. Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan II telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang dicapai dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, memperkuat ketahanan sektor-sektor ekonomi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Lingkungan ekonomi yang kondusif ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kokoh yang diciptakan melalui upaya-upaya menjaga kondisi fiskal yang berkelanjutan dan mewujudkan kondisi moneter yang mendukung pertumbuhan dengan inflasi yang terkendali; menciptakan keseimbangan eksternal; memantapkan sektor keuangan; dan meningkatkan investasi.

32. Dalam masa KIB I dan II, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap pada tingkat yang relatif tinggi serta menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap berbagai gejolak baik eksternal maupun dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 adalah sebesar 5,0 persen, secara bertahap mengalami kenaikan dan mencapai 6,3 persen pada tahun 2007. Krisis keuangan global yang terjadi sejak petengahan tahun 2007 mengakibatkan perekonomian Indonesia melambat menjadi 6,0 persen pada tahun 2008 dan 4,6 persen pada tahun 2009 dimana pada tahun 2009 hanya beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif, diantaranya China, India, dan Indonesia.

Gambar 5
Pertumbuhan Ekonomi dan PDB Per Kapita Tahun 2004-2013

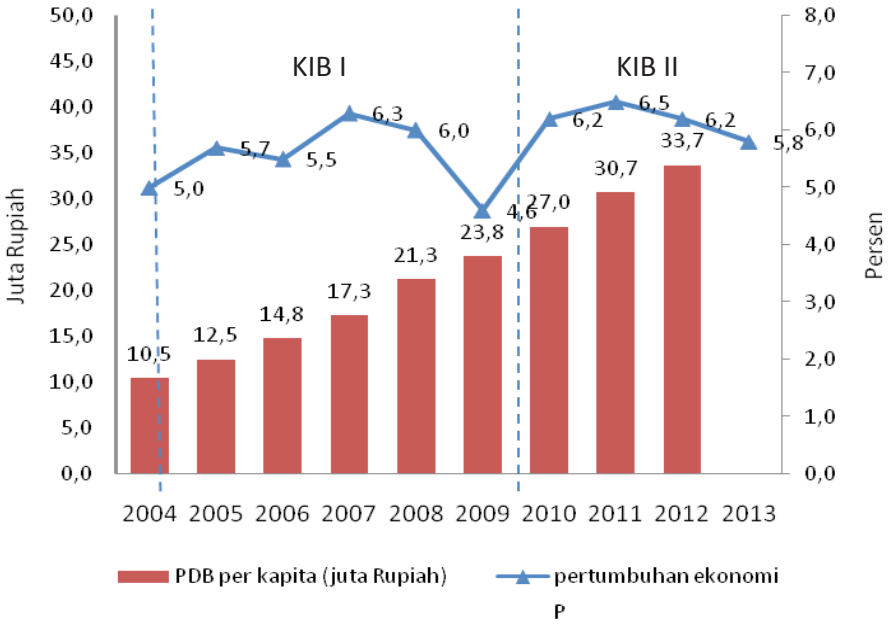

*) kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2013
Sumber: BPS

33. Dampak krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008 – 2009 mampu dikendalikan dengan berbagai kebijakan ekonomi yang tepat dan didukung oleh daya tahan permintaan domestik. Dengan berbagai kebijakan ini, pada tahun 2010 dan 2011 telah terjadi peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi kembali sedikit mengalami perlambatan menjadi 6,2 persen serta dalam tiga triwulan pertama tahun 2013 tumbuh 5,8 persen (y-o-y) yang dipengaruhi oleh krisis utang Eropa dan perlambatan ekonomi dunia. Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain.

34. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesejahteran masyarakat — yang ditunjukkan oleh PDB per kapita — terus membaik, yaitu naik lebih dari tiga kali lipat, dari Rp 10,5 juta pada tahun 2005 hingga mencapai Rp 33,7 Juta pada tahun 2012.

35. Upaya menciptakan kondisi fiskal berkelanjutan berhasil mencapai hal-hal sebagai berikut. Pertama, besaran APBN (*government size*) melampaui nilai Rp 1.000 triliun sejak tahun anggaran 2010 dengan belanja negara tercatat mencapai Rp 1.042,1 triliun. Sejak tahun tersebut besaran APBN meningkat terus dan pada RAPBN 2014 diperkirakan mencapai Rp 1.816,7 triliun. Volume APBN tumbuh sekitar 4,5 kali lipat dari pertama kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden dan memimpin KIB I pada tahun 2004 yang baru mencapai Rp 427,2 triliun. Besaran APBN tersebut mampu menjadi salah satu penyangga yang kuat bagi pemerintah dalam menghadapi beberapa krisis, terutama krisis global pada tahun 2008 dan 2012. Peningkatan volume APBN ini ditopang oleh peningkatan penerimaan pajak yang mencapai 4 kali lipat dari tahun 2004.

Tabel 2
Perkembangan APBN Tahun 2004-2013 (Triliun Rupiah)

URAIAN	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP
A. Pendapatan Negara	**403,4**	**495,2**	**638,0**	**707,8**	**981,6**	**848,8**	**995,3**	**1.210,6**	**1.338,1**	**1.502,0**
I Penerimaan Dalam Negara	403,1	493,9	636,2	706,1	979,3	847,1	992,2	1.205,3	1.332,3	1.497,5
1. Penerimaan Pajak	280,6	347,0	409,2	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	980,5	1.148,4
a. Pajak DN	267,8	331,8	396,0	470,1	622,4	601,3	694,4	819,8	930,9	1.099,9
b. Pajak Perdag Intl	12,7	15,2	13,2	20,9	36,3	18,7	28,9	54,1	49,7	48,4
2. PNBP	122,5	146,9	227,0	215,1	320,6	227,2	268,9	331,5	351,8	349,2
II Hibah	0,3	1,3	1,8	1,7	2,3	1,7	3,0	5,3	5,8	4,5
B. Belanja Negara	**427,2**	**509,6**	**667,1**	**757,7**	**985,7**	**937,4**	**1.042,1**	**1.295,0**	**1.491,2**	**1.726,2**
I Belanja Pem Pusat	297,5	361,2	440,0	504,6	693,4	628,8	697,4	883,7	1.010,6	1.196,8
II Transfer ke Daerah	129,7	150,5	226,2	253,3	292,4	308,6	344,7	411,3	480,6	529,4
1. Dana Perimbangan	112,2	143,2	222,1	244,0	278,7	287,3	316,7	347,2	411,3	445,5
2. Dana Otsus	6,9	7,2	4,0	9,3	13,7	21,3	28,0	64,1	69,4	83,8
III Suspen	(0,0)	(2,0)	0,9	(0,2)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0
C. Keseimbangan Primer	**38,7**	**50,8**	**49,9**	**30,0**	**84,3**	**5,2**	**41,5**	**8,9**	**(52,8)**	**(111,7)**
D. Surplus/Defisit	**(23,8)**	**(14,4)**	**(31,0)**	**(51,5)**	**(6,4)**	**(90,3)**	**(49,9)**	**(89,7)**	**(153,3)**	**(224,2)**
E. Pembiayaan	**20,8**	**11,1**	**29,4**	**42,5**	**84,1**	**112,6**	**91,6**	**130,9**	**175,2**	**224,2**
I Pembiayaan DN	48,9	21,4	56,0	69,0	102,5	128,1	96,1	148,7	198,6	241,1
II Pembiayaan LN	(28,1)	(10,3)	(26,6)	(26,6)	(18,4)	(15,5)	(4,6)	(17,8)	(23,5)	(16,9)

Sumber: Kementerian Keuangan

36. Kedua, keberlanjutan fiskal terus terjaga tercermin dari indikator rasio utang terhadap PDB, rasio defisit APBN terhadap PDB, serta keseimbangan primer. Rasio utang terhadap PDB terus menurun yaitu dari 56,6 persen pada tahun 2004 hingga menjadi 28,1 persen pada tahun 2010 melalui manajemen fiskal yang berhati-hati dan terencana. Dalam masa KIB II, keberlanjutan fiskal dapat terus dijaga dengan menurunkan rasio utang terhadap PDB hingga mencapai 24 persen pada tahun 2012 dan 23,4 persen pada tahun 2013 (angka sementara). Pada bulan Oktober 2006, Pemerintah Indonesia telah melunasi utang terhadap IMF berupa sisa pinjaman sebesar US$ 3,181 miliar yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010. Pelunasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan fiskal di dalam negeri.

Gambar 6
Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB Tahun 2004-2013

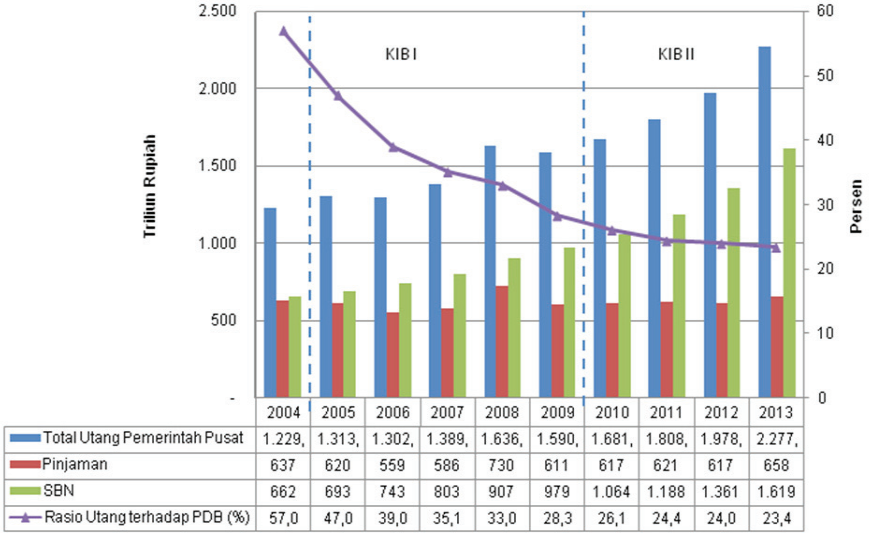

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total Utang Pemerintah Pusat	1.229,	1.313,	1.302,	1.389,	1.636,	1.590,	1.681,	1.808,	1.978,	2.277,
Pinjaman	637	620	559	586	730	611	617	621	617	658
SBN	662	693	743	803	907	979	1.064	1.188	1.361	1.619
Rasio Utang terhadap PDB (%)	57,0	47,0	39,0	35,1	33,0	28,3	26,1	24,4	24,0	23,4

Sumber: Kementerian Keuangan

37. Rasio defisit APBN terhadap PDB terus dijaga tidak melebihi 3 persen. Bahkan dalam beberapa tahun anggaran pemerintah dapat menjaga rasio defisit APBN terhadap PDB berada di bawah 1 persen yaitu pada tahun 2005, 2006, 2008 dan 2010 dimana masing-masing sebesar 0,5 persen, 0,9 persen, 0,1 persen dan 0,7 persen. Pada APBNP 2013, defisit direncanakan sebesar 2,4 persen PDB, sedangkan pada APBN 2014 direncanakan sebesar 1,5 persen PDB.

38. Ketiga, penerimaan domestik yang ditunjukkan oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB menunjukkan angka yang relatif stabil pada kisaran 12 – 13 persen. Capaian tertinggi rasio penerimaan pajak terhadap PDB terjadi pada tahun 2008, mencapai 13,3 persen.

39. Stabilitas ekonomi terus ditingkatkan. Indikator-indikator utama kebijakan moneter antara lain inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta suku bunga terus dijaga pada masa KIB I dan KIB II. Kebijakan pengendalian inflasi pada pemerintahan KIB I cukup besar tantangannya. Stabilitas harga mengalami tekanan besar pada tahun 2005 dan 2008 oleh gejolak moneter di dalam negeri dan meningkatnya harga minyak mentah di pasar dunia yang menuntut dilakukannya langkah-langkah penguatan fiskal sehingga inflasi meningkat menjadi 17,1 persen pada tahun 2005 dan 11,1 persen pada tahun 2008. Dengan langkah-langkah konkrit, inflasi dapat dikembalikan pada kisaran 5 – 6 persen. Pada masa pemerintahan KIB II tercatat inflasi cukup terkendali. Pada tahun 2010, inflasi mencapai 7,0 persen, turun menjadi 3,8 persen pada tahun 2011, sedikit meningkat menjadi 4,3 persen pada tahun 2012. Dalam rangka meningkatkan ketahanan fiskal, pada pertengahan tahun 2013 dilakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Dengan upaya untukmenjaga pengaruhnya terhadap stabilitas harga di dalam negeri, inflasi pada bulan November 2013 dapat dikendalikan pada tingkat 8,4 persen (y-o-y) dan diperkirakan kembali pada tingkat 5 persen pada pertengahan tahun 2014.

40. Keseimbangan eksternal terjaga dengan baik. Neraca transaksi berjalan serta neraca transaksi modal dan finansial menunjukkan kinerja yang positif pada masa KIB I dan II. Investasi langsung yang masuk ke Indonesia terus menunjukkan peningkatan sejak sepuluh tahun terakhir sehingga mampu mendorong surplus neraca transaksi modal dan finansial. Menurunnya harga komoditi primer sejak tahun 2011 telah mengakibatkan defisit neraca transaksi berjalan sejak tahun 2012. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan antara lain dengan mendorong ekspor, mengendalikan impor yang kurang produktif, serta menekan defisit pada neraca perdagangan migas. Upaya untuk menjaga neraca modal dan finansial terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas neraca pembayaran secara menyeluruh.

Gambar 7
Neraca Transaksi Berjalan dan Neraca Transaksi Modal dan Finansial Tahun 2004-2013

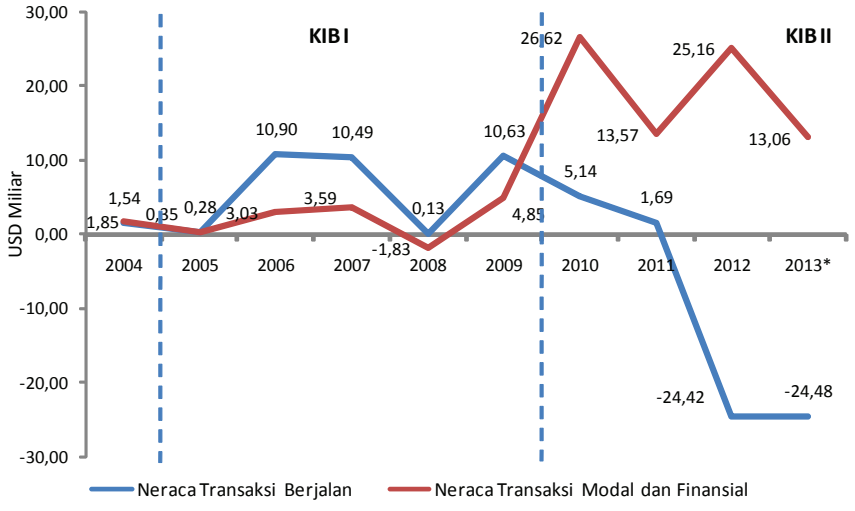

*) Kumulatif sampai dengan triwulan III Tahun 2013
Sumber: Bank Indonesia

41. Dalam masa KIB I dan KIB II, cadangan devisa meningkat cukup tinggi. Pada akhir tahun 2004, cadangan devisa yang berjumlah USD 36,3 miliar meningkat menjadi USD 66,1 miliar pada tahun 2009 serta mencapai puncaknya pada Agustus 2011 sebesar USD 124 miliar. Perlambatan ekonomi dunia yang berpengaruh pada penerimaan ekspor dan tinggi kebutuhan impot oleh permintaan domestik yang tetap kuat menurunkan cadangan devisa menjadi USD 97,0 miliar pada bulan November 2013, masih pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Gambar 8
Cadangan Devisa dan Investasi Langsung Tahun 2004-2013

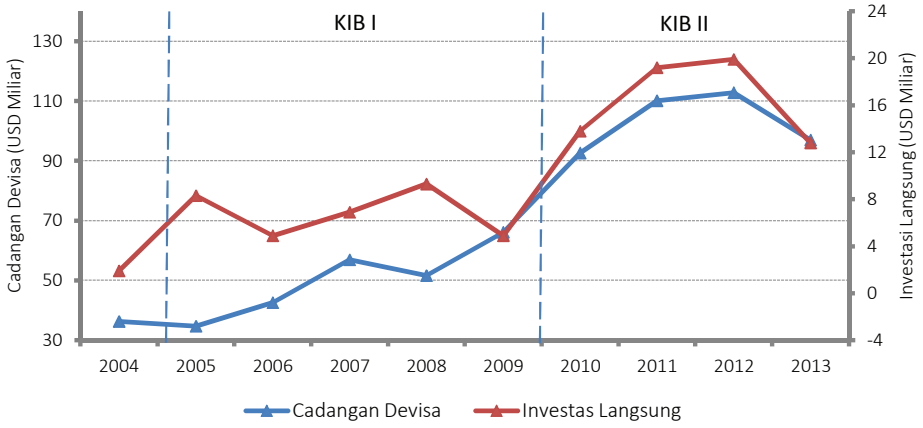

*) Kumulatif sampai dengan Nopember 2013
Sumber: Bank Indonesia

42. Pemantapan sektor keuangan difokuskan pada ketahanan dan daya saing sektor keuangan dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Upaya penyempurnaan sarana stabilitas moneter dan keuangan, diawali pada tahun 2005 dengan dimulai penggunaan kerangka *Inflation Targeting Framework (ITF)* dengan menggunakan instrumen BI rate dan SBI sebagai alat pengendalian moneter/ keuangan yang utama. Beberapa kebijakan penting pengaturan perbankan yang telah dikeluarkan antara lain adalah penyempurnaan simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor Keuangan/ JPSK (Perrpu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK). Di sisi keuangan syariah, telah dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yeng memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan industri perbankan/ keuangan syariah. Dalam masa pelaksanaan KIB II 2010 – 2014, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan non-perbankan seperti Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya, setelah dikeluarkannya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah dilaksanakannya masa transisi pada tahun 2013, pada awal tahun 2014 OJK diharapkan telah dapat melaksanakan tugasnya sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan yang mandiri.

43. Di sisi lembaga keuangan non-bank, telah dikeluarkan berbagai kebijakan penyempurnaan kelembagaan baik di pasar modal, industri dana pensiun dan asuransi, yang berdampak pada peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG), volume transaksi pasar modal, aset dan investasi dana pensiun dan asuransi. Pada periode 2004 hingga awal 2008, IHSG mengalami kenaikan yang signifikan karena semakin membaiknya ekonomi Indonesia, kondisi keamanan yang relatif stabil dan membaiknya bursa regional yang menciptakan optimisme pasar. Memasuki tahun 2008, IHSG mulai menurun drastis karena pengaruh krisis keuangan global yang terjadi. Pada akhir tahun 2009, IHSG berada pada posisi 2.534,4 yang menunjukkan mulai terjadi pemulihan perekonomian global. Kenaikan IHSG berlangsung hingga 2010, tetapi kondisi pasar modal Indonesia mengalami

tekanan akibat krisis utang zona Eropa pada tahun 2011. Sepanjang tahun 2012 hingga akhir semester pertama 2013 peningkatan IHSG tidak terlepas dari kebijakan *quantitative easing* Pemerintah AS. Memasuki semester kedua 2013 Pemerintah AS berniat mengurangi kebijakan quantitative easing yang berpengaruh harga saham dunia. Secara rata-rata perkembangan IHSG hingga Oktober 2013 (4.510,6) masih positif dibandingkan dengan rata-rata tahun 2012 (4.316,7).

Gambar 9
Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Tahun 2004-2013

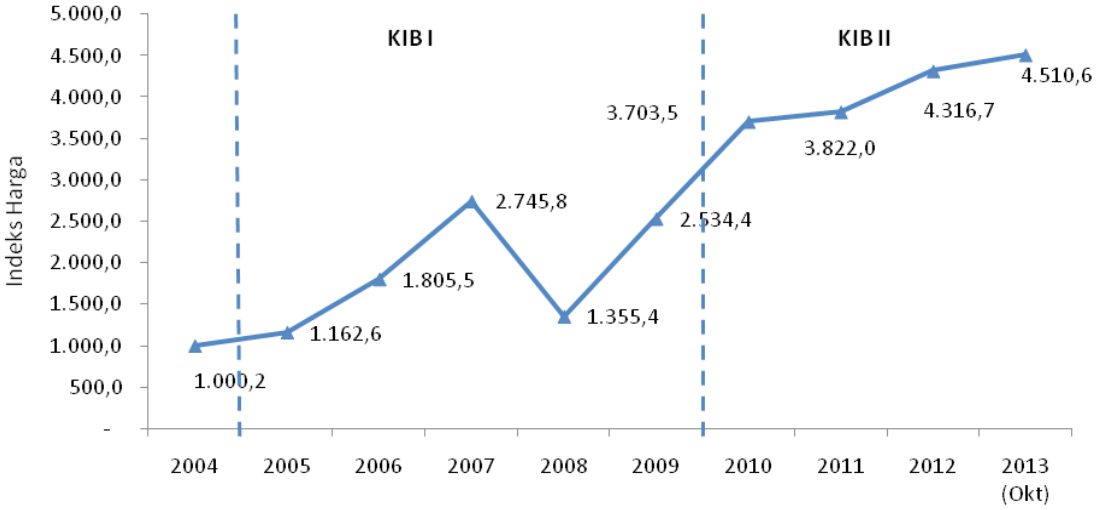

Sumber: BPS

44. Investasi terus didorong untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun waktu 2004-2013 peranan Pembentukan Modal Tetap Bruto dalam PDB terus meningkat. Pada tahun 2009, rasio investasi terhadap PDB meningkat menjadi 31,1 persen, jauh lebih tinggi dari tahun 2004 (22,4 persen) serta pada tahun 2012 meningkat menjadi 33,1 persen. Meningkatkanya peranan investasi telah memberi sumbangan yang besar bagi perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 4,6 persen periode 2000-2004, menjadi rata-rata 5,6 persen periode 2005-2009, rata-rata 6,3 persen periode 2010-2012.

45. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki iklim dan daya tarik investasi telah meningkatkan kepercayaan dunia usaha baik dalam dan luar negeri. Pengelolaan kebijakan makro yang hati-hati (*prudent*), terjaganya stabilitas politik dan keamanan, momentum pertumbuhan serta upaya membangun komunikasi yang baik dengan opinion maker internasional telah meningkatkan peringkat utang Indonesia. *Japan Credit Rating (JCR) Agency* merupakan lembaga pemeringkat internasional pertama yang memberikan peringkat investment grade (BBB) pada Juli 2010, kemudian disusul oleh Fitch pada Desember 2011, Moodys pada Januari 2012 dan R&I (*Rating and Investment Information*) pada Oktober 2012.

46. Pertumbuhan sektor pertanian selama periode KIB I (2005-2009), rata-rata mencapai 3,7 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari tanaman bahan makanan yang mencapai 4,0 persen per tahun, perkebunan yang mencapai 3,2 persen per tahun, peternakan 3,0 persen per tahun, dan perikanan 5,5 persen per tahun. Pada periode KIB II pertumbuhannya mencapai rata-rata 3,4 persen per tahun yang bersumber pada tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masing-masing mencapai rata-rata 2,0 persen, 4,4 persen, 4,5 persen, dan 6,5 persen.

Tabel 3
Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian Tahun 2004-2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)	2012**)	2013***)
1.	Tanaman Bahan Makanan	%	2,9	2,6	3,0	3,4	6,1	5,0	1,6	1,8	3,0	1,8
2.	Perkebunan	%	0,4	2,5	3,8	4,6	3,7	1,7	3,5	4,5	5,1	4,7
3.	Peternakan dan hasilnya	%	3,4	2,1	3,4	2,4	3,5	3,5	4,3	4,8	4,8	4,3
4.	Kehutanan	%	1,3	-1,5	-2,9	-0,8	0,0	1,8	2,4	0,9	0,2	0,8
5.	Perikanan	%	5,6	5,9	6,9	5,4	5,1	4,2	6,0	7,0	6,5	6,4
Pertanian		%	2,8	2,7	3,4	3,5	4,8	4,0	3,0	3,4	4,0	3,3

Sumber : BPS
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
***) Angka Sangat Sangat Sementara

47. Produksi pangan utama terus meningkat dengan tingkat swasembada yang semakin tinggi. Pada tahun 2013, surplus beras mencapai 8,9 juta ton dan ditargetkan surplus beras dapat mencapai 10 juta ton di tahun 2014.

48. Sektor pertanian masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu mencapai rata-rata 41,4 persen pada KIB I, dan 36,1 persen pada KIB II. Penurunan tersebut menunjukkan produktivitas yang meningkat di sektor pertanian. Dalam KIB I, produktivitas sektor pertanian rata-rata mencapai Rp. 6,7 juta per tenaga kerja, sementara pada KIB II (sampai dengan tahun 2012) meningkat menjadi Rp. 7,9 juta per tenaga kerja.

Gambar 10
Perkembangan Tenaga Kerja dan Produktivitas Sektor Pertanian Tahun 2004-2013

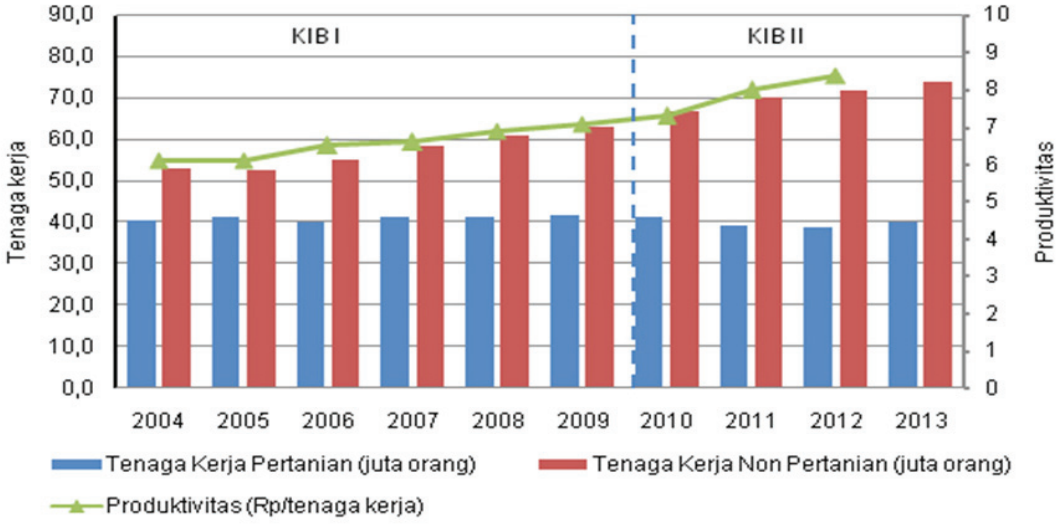

Sumber: BPS

49. Untuk komoditi unggulan perkebunan, selama periode KIB I dan KIB II hampir semua komoditi mengalami peningkatan kecuali jambu mete dan teh. Pada periode KIB II, produksi komoditi karet, tembakau dan lada mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari periode KIB I, yaitu masing-masing meningkat rata-rata sebesar 7,7 persen, 13,6 persen dan 2,1 persen per tahun. Produksi kelapa sawit dalam periode KIB I meningkat cukup

besar yaitu rata-rata 13,4 persen per tahun. Meskipun dalam periode KIB II produksi kelapa sawit lebih kecil dari periode KIB II, tetapi masih mengalami peningkatan yang relatif besar yaitu rata-rata sebesar 6,9 persen per tahun. Indonesia merupakan pengekspor kelapa sawit terbesar dan pengekspor karet terbesar ke-2 di dunia. Pada KIB II, Indonesia menerapkan ISPO untuk meningkatkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan

50. Produksi perikanan terus meningkat pada KIB I dan KIB II dan semakin didominasi oleh perikanan budidaya. Pada KIB I laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan adalah 9,9 persen per tahun, sementara pada KIB II meningkat mencapai 16,5 persen per tahun. Sumbangan perikanan terhadap devisa negara semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ekspor hasil perikanan. Pada KIB I, pertumbuhan nilai ekspor mencapai rata-rata 7,2 persen per tahun. Selanjutnya pada KIB II meningkat menjadi 16,1 persen per tahun.

51. Untuk meningkatkan nilai sumber daya hutan, ekspor produk kayu serta *transboundary illegal trading of log* dikembangkan pola Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pada bulan September 2013 telah ditandatangani *Voluntary Partnership Agreement (VPA)* dengan Uni Eropa yang mengakui sertifikasi SVLK produk kayu yang masuk ke 28 negara anggota Uni Eropa.

52. Produksi mineral berupa bijih nikel, bauksit, bijih besi, dan Fe Ni mengalami peningkatan produksi pada periode KIB II dibandingkan dengan KIB I, dimana bijih nikel meningkat hampir empat kali lipat, bauksit dua kali. Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 4/2009, telah dilakukan proses renegosiasi pasal-pasal dalam Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara pemerintah dan pelaku usaha pertambangan. Hasil renegosiasi sampai November 2013 dari 36 KK yang diproses, dapat diselesaikan 3 KK yang sudah sepakat seluruhnya. Sedangkan dari 74 PKP2B, baru 5 PKP2B yang sudah sepakat seluruhnya.

53. Total produksi sumber daya energi meningkat dari 1.573 juta barel setara minyak pada awal KIB I menjadi sebesar 2.110 meskipun produksi minyak bumi menurun. Peningkatan produksi terjadi untuk energi yang bersumber dari batubara dan gas bumi. Produksi gas bumi relatif lebih stabil dibandingkan dengan produksi minyak bumi. Pada periode KIB I, produksi gas bumi berkisar antara 2,8 – 3,1 juta MMSCF. Sementara pada awal periode KIB II produksi gas bumi sudah meningkat di atas 3,1 juta MMSCF. Dengan peningkatan produksi gas bumi ini, total pasokan minyak dan gas bumi pada tahun 2013 duiperkirakan mencapai 2.080 juta barel setara minyak per hari.

Tabel 4
Cadangan dan Produksi Beberapa Jenis Energi Tahun 2004-2013

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2004	KIB I					KIB II			
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Produksi Minyak Bumi	Juta Barel	400,5	387,7	367,1	348,3	357,5	346,3	344,8	329,2	314,7	306,6
2	Produksi Gas Bumi	Juta MMSCF	3,0	3,0	3,0	2,8	2,9	3,1	3,4	3,3	3,2	2,5
3	Produksi Batubara	Juta Ton	131	154	194	217	240	254	275	353	386	391
4	BBN	Ribu Kiloliter	na	na	na	na	53	189,6	242,7	1.812,2	2.221,4	1.679,2**)
5	BBM	Juta Barel	283,2	268,5	257,8	244,4	251,5	255,3	235,8	237,1	231,9	na
6	LPG	Juta Ton	2,0	1,8	1,4	1,4	1,7	2,2	2,5	2,3	2,5	na

Sumber: Kementerian ESDM
Catatan: *) Perkiraan Realisasi 2013; **) Perkiraan Realisasi s/d Oktober 2013

54. Produksi batubara selama kurang lebih 10 tahun terakhir (2004-2013) mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan rata-rata produksi batubara sejak tahun 2004-2012 mencapai 18,5 persen per tahun dan menjadi penyumbang pasokan sumber daya energi yang cukup signifikan, terutama untuk pembangkit tenaga listrik.

55. Dengan peningkatan produksi sumber daya energi lain, maka bauran supply energi primer pada periode KIB II lebih baik daripada periode KIB I. Pangsa minyak bumi turun dari 42,3 persen pada masa KIB I menjadi 38,2 persen pada masa KIB II. Sementara untuk gas naik dari 16,4 persen pada KIB I menjadi 18,9 persen pada KIB II.

56. Pada periode 2005 – 2009 pertumbuhan industri non-migas melambat, namun kembali mengalami akselerasi dari tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2011 pertumbuhan industri non-migas mencapai 6,7 persen, dan berlanjut pada tahun 2012 sebesar 6,4 persen, dan pada triwulan III kumulatif tahun 2013 industri non-migas tumbuh sebesar 6,2 persen. Pada periode KIB I, tenaga kerja baru yang terserap di sektor industri mencapai 1 juta orang. Sedangkan pada KIB II yaitu pada tahun 2010-2013, tenaga kerja sektor industri mengalami kenaikan sebanyak 1 juta orang, yaitu 13,8 juta orang pada tahun 2010 menjadi 14,8 juta orang di tahun 2013.

57. Investasi PMA sektor industri pada tahun 2005-2009 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,3 persen per tahun. Jumlah ijin usaha PMDN yang diberikan mencapai 693 dan PMA mencapai 2.768. Pada Periode KIB II, investasi PMDN mengalami kenaikan yang cukup besar, dengan persentase kenaikan rata-rata sebesar 24,9 persen. Cabang-cabang industri yang mengalami kenaikan cukup tinggi di antaranya industri tekstil, industri barang dari kulit & alas kaki, industri kertas & percetakan, industri karet dan plastik, industri mineral non logam, industri logam, mesin dan elektronik, serta industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain. Investasi PMA sektor industri pada tahun 2010-2012 terus mengalami kenaikan yang sangat besar, dengan rata-rata kenaikannya sebesar 51,9 persen per tahun. Total ijin usaha yang diberikan dalam periode 2010-2013 adalah 2.057.

58. Ekspor produk industri pada tahun 2005-2009 terus meningkat, dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,2 persen per tahun. Pada tahun 2009 terjadi penurunan ekspor produk industri oleh krisis ekonomi global yang berdampak pada penurunan pangsa pasar ekspor produk industri. Secara keseluruhan ekspor produk industri tetap mengalami peningkatan. Ekspor produk industri pada tahun 2010-2012 naik dengan rata-rata 5,8 persen per tahun.

Tabel 5
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (Persen)

LAPANGAN USAHA	2004	KIB I					KIB II			
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 *
INDUSTRI PENGOLAHAN	**6,38**	**4,60**	**4,59**	**4,67**	**3,66**	**2,21**	**4,74**	**6,14**	**5,73**	**5,55**
a. Industri Migas	-1,95	-5,67	-1,66	-0,06	-0,34	-1,53	0,56	-0,94	-2,71	-3,32
b. Industri Non Migas	**7,51**	**5,86**	**5,27**	**5,15**	**4,05**	**2,56**	**5,12**	**6,74**	**6,40**	**6,22**
1). Makanan, Minuman dan Tembakau	1,39	2,75	7,21	5,05	2,34	11,22	2,78	9,14	7,74	3,45
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki	4,06	1,31	1,23	-3,68	-3,64	0,60	1,77	7,52	4,19	6,02
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.	-2,07	-0,92	-0,66	-1,74	3,45	-1,38	-3,47	0,35	-2,78	8,20
4). Kertas dan Barang cetakan	7,61	2,39	2,09	5,79	-1,48	6,34	1,67	1,40	-5,26	3,74
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet	9,01	8,77	4,48	5,69	4,46	1,64	4,70	3,95	10,25	3,66
6). Semen & Brg. Galian bukan logam	9,53	3,81	0,53	3,40	-1,49	-0,51	2,18	7,19	7,85	2,80
7). Logam Dasar Besi & Baja	-2,61	-3,70	4,73	1,69	-2,05	-4,26	2,38	13,06	6,45	10,30
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya	17,67	12,38	7,55	9,73	9,79	-2,87	10,38	6,81	6,94	10,04
9). Barang lainnya	12,77	2,61	3,62	-2,82	-0,96	3,19	3,00	1,82	-1,00	-4,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO	**5,03**	**5,69**	**5,50**	**6,35**	**6,01**	**4,63**	**6,22**	**6,49**	**6,23**	**5,83**

Sumber: BPS, diolah Kemenperin
* Kumulatif sampai dengan Triwulan III 2013

59. Peranan koperasi pada masa KIB I dan KIB II terus ditingkatkan. Rata-rata pertumbuhan volume usaha koperasi (17,9 persen) dan selisih hasil usaha/keuntungan koperasi (18,4 persen) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan unit koperasi (5,1 persen) selama periode KIB I dan II menunjukkan potensi usaha koperasi yang besar. Perkembangan usaha koperasi tersebut perlu didukung oleh partisipasi anggota mengingat rata-rata pertumbuhan anggota koperasi hanya sebesar 3,2 persen.

60. Pada periode KIB I dan II, UMKM berperan sebagai penyangga perekonomian terutama dalam penciptaan usaha baru dan lapangan kerja. Usaha mikro yang merupakan sumber wirausaha baru juga terus meningkat, dan proporsinya sangat dominan dalam struktur pelaku usaha di Indonesia. Sementara itu peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah usaha menunjukkan adanya usaha yang "naik kelas".

61. Jumlah tenaga kerja UMKM terus meningkat, dengan peningkatan tertinggi pada periode KIB II (rata-rata tumbuh sebesar 16,5 persen). Perbaikan produktivitas UMKM terus dilakukan dengan produktivitas UMKM saat ini yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat produktivitas usaha besar. UMKM masih berperan besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) meskipun trennya terus mengalami penurunan pada periode 2006-2012. Tren penurunan juga terjadi pada kontribusi UMKM dalam nilai ekspor non migas yaitu dari 20,3 persen pada tahun 2004 menjadi 14,1 persen pada tahun 2012. Tren penurunan kontribusi PDB dan ekspor tersebut merupakan dampak dari pelemahan perekonomian global, indikasi peningkatan persaingan di pasar domestik dan internasional, dan/atau penurunan posisi tawar UMKM.

62. Kinerja pembangunan perdagangan luar negeri ditunjukkan antara lain oleh tingkat kebergantungan Indonesia terhadap lima pasar utama ekspor Indonesia yang mengalami penurunan. Secara komposisi, negara yang termasuk dalam 5 (lima) pasar utama ekspor Indonesia mengalami perubahan selama periode 2004-2013. Pada periode tahun 2004-2009, lima pasar utama tujuan ekspor nonmigas adalah Amerika Serikat, Singapura, Jepang, RRT, dan Malaysia. Kemudian, pada periode 2010-2013, kelima negara tersebut adalah RRT, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan India.

63. Dalam bidang perdagangan dalam negeri, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis, pemerintah telah melakukan upaya revitalisasi sarana distribusi di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2005-2009 pemerintah pusat telah membantu melakukan revitalisasi terhadap 406 pasar tradisional, baik revitalisasi fisik, maupun revitalisasi manajemen. Pada periode 2010-2014, Pemerintah Pusat telah membantu melakukan revitalisasi pasar tradisional sebanyak 466 unit dan mendirikan 70 pasar percontohan. Sementara itu melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus pemerintah terus melanjutkan upaya pembenahan pasar tradisional dengan skala yang lebih kecil serta pembangunan gudang dengan skema Sistem Resi Gudang (SRG). Dari tahun 2010 sampai dengan 2013 telah dibangun dan dianggarkan sebanyak 1973 unit pasar dan dari tahun 2008 sampai dengan 2013 sebanyak 78 unit gudang.

64. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia menyumbang perolehan devisa bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2004 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 5,3 juta dan pada tahun 2012 telah mencapai 8,0 juta. Pada periode 2010-2012, jumlah wisman ke Indonesia konsisten tumbuh positif. Penumbuhan jumlah wisman ini menunjukkan bahwa kepercayaan luar negeri terhadap kemanan nasional telah pulih. Sementara itu, perkembangan wisatawan nusantara (wisnus) kecuali tahun 2004 dan 2005, jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisnus selalu meningkat. Pertumbuhan total pengeluaran wisnus tertinggi terjadi di tahun 2007, sebesar 23,5 persen, dan terendah di tahun 2004 sebesar 1,2 persen.

Gambar 11
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nilai Devisa Tahun 2004-2012

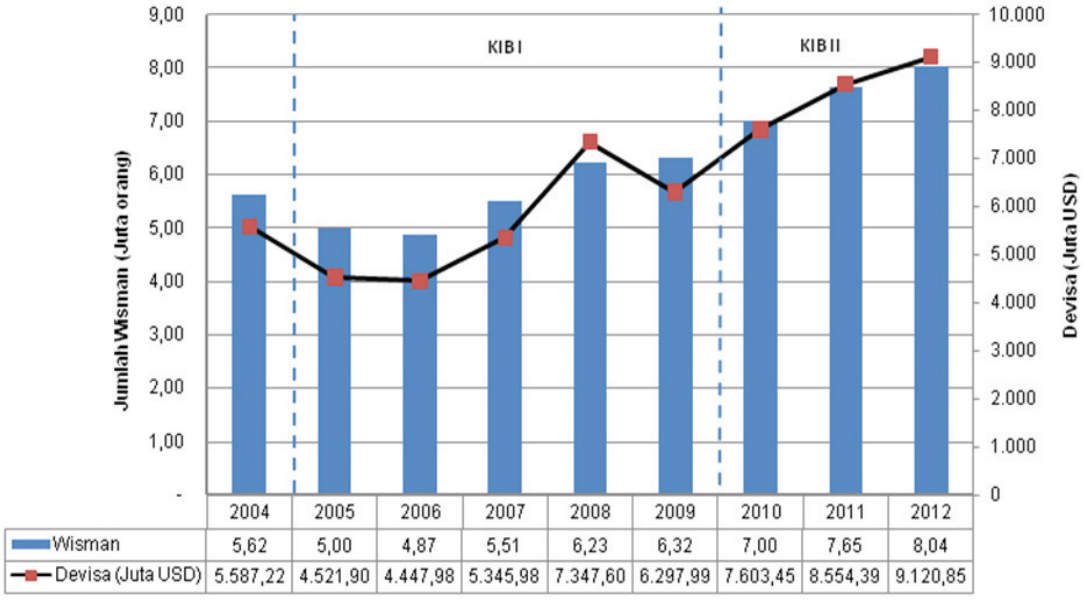

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wisman	5,62	5,00	4,87	5,51	6,23	6,32	7,00	7,65	8,04
Devisa (Juta USD)	5.587,22	4.521,90	4.447,98	5.345,98	7.347,60	6.297,99	7.603,45	8.554,39	9.120,85

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

65. Nilai Produksi Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 mengalami perlambatan namun pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2013 diproyeksi mencapai 5,8 persen lebih tinggi dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012 (4,5 persen) dan tahun 2011 (5,0 persen). Disamping itu, kontribusi yang disumbangkan oleh Ekonomi kreatif berbasis Seni dan Budaya (EKSB) serta Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek pun sama-sama mengalami peningkatan.

66. Melalui penerbitan berbagai regulasi yang mendorong terwujudnya kompetisi yang setara serta pemberian berbagai lisensi seperti akses nirkabel tetap (*fixed wireless access*), seluler generasi ketiga (3G), akses pita lebar nirkabel (*broadband wireless access*) dalam periode 2004-2009, penetrasi total akses telekomunikasi nasional meningkat tajam yaitu dari 18,8 persen pada tahun 2004 menjadi 85,3 persen pada tahun 2009 yang sebagian besar merupakan akses nirkabel (*wireless*). Adapun penetrasi internet mengalami peningkatan dari 5,2 persen pada tahun 2004 menjadi 13,0 persen pada tahun 2009. Penetrasi total akses telekomunikasi mencapai 127,0 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai 146,0 persen pada tahun 2013, sedangkan penetrasi internet mencapai 25 persen pada tahun 2012 dan diperkirakan mencapai 31 persen pada tahun 2013.

67. Pada periode KIB II, pembangunan infrastruktur telekomunikasi difokuskan kepada pembangunan pita lebar (*broadband*) yang merupakan salah satu pilar daya saing. Dari total 497 kabupaten/kota, PT Telkom berkomitmen untuk membangun 446 kabupaten/kota dengan dana perusahaan sedangkan Pemerintah akan membangun di 51 kabupaten/kota sisanya yang berada di wilayah non komersial. Hingga akhir tahun 2012, pembangunan jaringan serat optik *broadband* sudah menjangkau 346 kabupaten/kota atau 69,6 persen dari target.

68. Kebijakan pembangunan kapasitas inovasi nasional pada KIB I dimulai penyelenggaraan pendidikan yang diamanatkan konstitusi yaitu pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang dimulai pada tahun 2009. Pada KIB II, pendidikan tinggi dibenahi dengan ditetapkannya UU No 12 Tahun 2012 dengan membagi penyelenggaran pendidikan tinggi ke dalam pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Kemudian berbagai regulasi juga ditetapkan antara lain pengaturan alih teknologi kekayaan intelektual, perizinan bagi peneliti asing, alokasi untuk kegiatan litbang di badan usaha, dan perizinan penelitian berisiko

tinggi, pengaturan alih teknologi kekayaan intelektual, perizinan bagi peneliti asing, alokasi untuk kegiatan litbang di badan usaha, dan perizinan penelitian berisiko tinggi. Untuk mendorong swasta melakukan riset, maka Pemerintah memberi insentif dalam bentuk pengurangan pendapatan kena pajak perusahaan bagi yang memberikan sumbangan kegiatan penelitian dan pengembangan; pembebasan bea masuk dan cukai bagi peralatan riset.

69. Kapasitas untuk menyediakan layanan teknologi bagi industri telah berhasil ditingkatkan yang meliputi: Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran, Balai Besar Teknologi Energi, Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Balai Pengkajian Teknologi Polimer, Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi, Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Teknologi Lingkungan, Balai Inkubator Teknologi.

70. Indonesia kaya sumberdaya hayati baik di darat maupun di laut yang berpotensi menjadi sumber keunggulan ekonomi di masa depan. Untuk itu telah dibangun sarana penyimpan koleksi tanaman Indonesia (*Herbarium*), koleksi jaringan (*InaCC*), kebun raya, penyelamatan terumbu karang (*coral reef*) guna menjaga dan merawat kekayaan suberdaya hayati.

71. Salah satu sumbangan penting iptek dalam perekonomian adalah standardisasi yang berkembang menjadi infrastruktur mutu. Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan Standard Nasional Indonesia (SNI). Secara keseluruhan, hingga Oktober 2013, BSN telah menetapkan 9.532 SNI dengan rincian: 1.806 SNI yang ditetapkan untuk abolisi, dan 7.726 SNI yang ditetapkan masih berlaku.

72. Penelitian dan pengembangan di bidang: pangan dan pertanian, energi; kesehatan; TIK; transportasi; Hankam; dan material maju telah memberikan kontribusi bagi pembangnan ekonomi, antara lain dalam bentuk varietas unggul tanaman pangan, protitip teknologi baru, teknologi tepat guna yang didisseminasikan, serta berbagai layanan teknologi ke industri.

73. Dalam hal pengawasan penggunaan tenaga nuklir, berbagai regulasi untuk memperkuat kelembagaan pengawasan telah ditetapkan, terutama UU No. 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*), serta berbagai Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

74. Pembangunan infrastruktur yang terdiri dari konektivitas, ketahanan energi, sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta, terus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan di segala bidang. Peringkat infrastruktur Indonesia yang pada tahun 2009 turun menjadi 96 dari 134 negara dapat dinaikkan lagi menjadi urutan 82 dari 148 negara pada tahun 2013.

75. Konektivitas didorong dengan pembangunan sektor transportasi serta komunikasi dan informasi. Di sektor jalan, kondisi mantap meningkat dari 80,6 persen pada tahun 2004 menjadi 92,5 persen pada tahun 2013 serta pembangunan jalan nasional sepanjang 34.628 km pada akhir tahun 2004 meningkat menjadi 38.245 km pada tahun 2013. Pembangunan jalan dan jembatan ditingkatkan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diantaranya jembatan kelok Sembilan, jalan Raya Nagrek, jalan Tayan Pontianak, jalan Maros, Jalan tol Tanjung Benoa- Nusa Dua, dan Jembatan Merah Putih.

Gambar 12
Perkembangan Peningkatan Jalan Nasional (Tingkat Kemantapan Jalan)

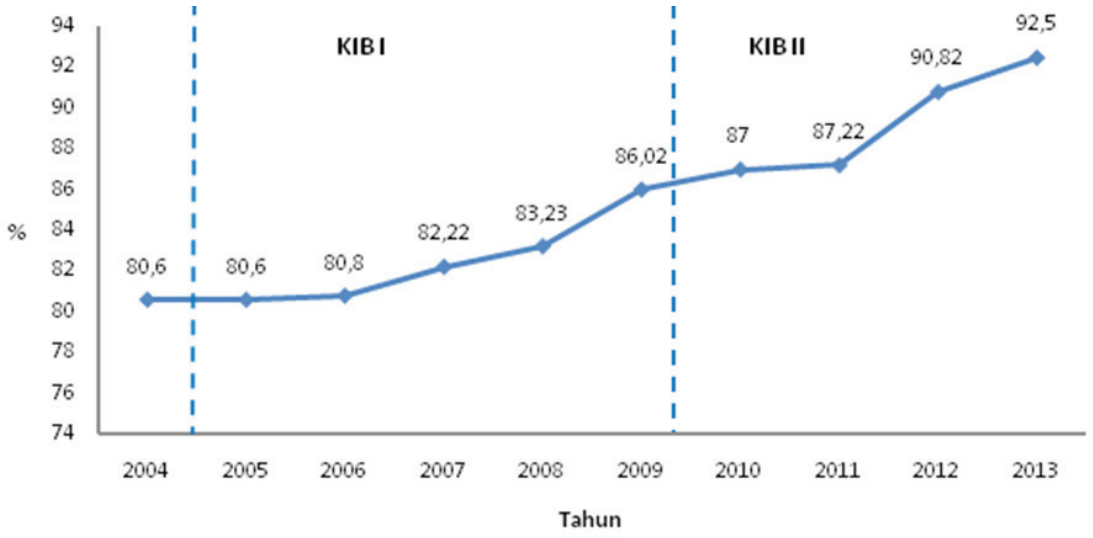

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum

76. Sektor tranportasi darat diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sarana transportasi perkotaan berupa BRT. Sampai dengan tahun 2013, 16 kota besar telah menyelenggarakan angkutan berupa BRT. Pembangunan prasarana dermaga penyeberangan telah dilaksanakan di 550 lokasi dan pembangunan prasarana dermaga sungai telah dilaksanakan di 135 lokasi.

77. Sektor transportasi laut terus didorong untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di seluruh nusantara. Jumlah rute penyelenggaran angkutan laut perintis yang semula sebanyak 47 rute pada tahun 2004 ditingkatkan menjadi 80 rute pada tahun 2013, atau naik sebesar 70,2 persen. Kenaikan tersebut juga diimbangi dengan peningkatan jumlah penumpang kapal perintis sebesar 30,7 persen yaitu dari sekitar 265 ribu penumpang pada tahun 2004 menjadi 346.648 penumpang pada tahun 2012. Penerapan asas cabotage terus didorong sehingga mampu meningkatkan jumlah armada kapal niaga nasional mencapai 107,5 persen.

78. Pembangunan transportasi udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan udara dan pembangunan bandara baru. Beberapa bandara strategis yang telah dibangun diantaranya Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM), Bandar Udara Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Kualanamu Sumatera Utara. Jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri di Indonesia yang pada tahun 2004 hanya sebesar 23.763.950 orang meningkat menjadi 82.134.683 penumpang pada tahun 2013 atau naik rata-rata 21,5% per tahun. Ini sejalan juga dengan pertumbuhan arus lalu lintas kargo yang meningkat rata rata 13,3 persen per tahun.

79. Sektor perkeretaapian diarahkan pada pembangunan rel ganda dan jalur kereta menuju bandara, modernisasi persinyalan, serta fasilitas keselamatan kereta api. Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, maka dilaksanakan kebijakan membatasi penggunaan/*occupance* rate penyediaan dana PSO dan pola operasi KA Jabodetabek juga ditingkatkan untuk meningkatkan frekuensi pelayanan dan jumlah penumpang KA. Peningkatan PSO dari Rp. 140 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp. 704,8 miliar pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan lebih dari 5 (lima) kali.

Gambar 13
Subsidi PSO (*Public Service Obligation*) Kereta Ekonomi 2004-2013

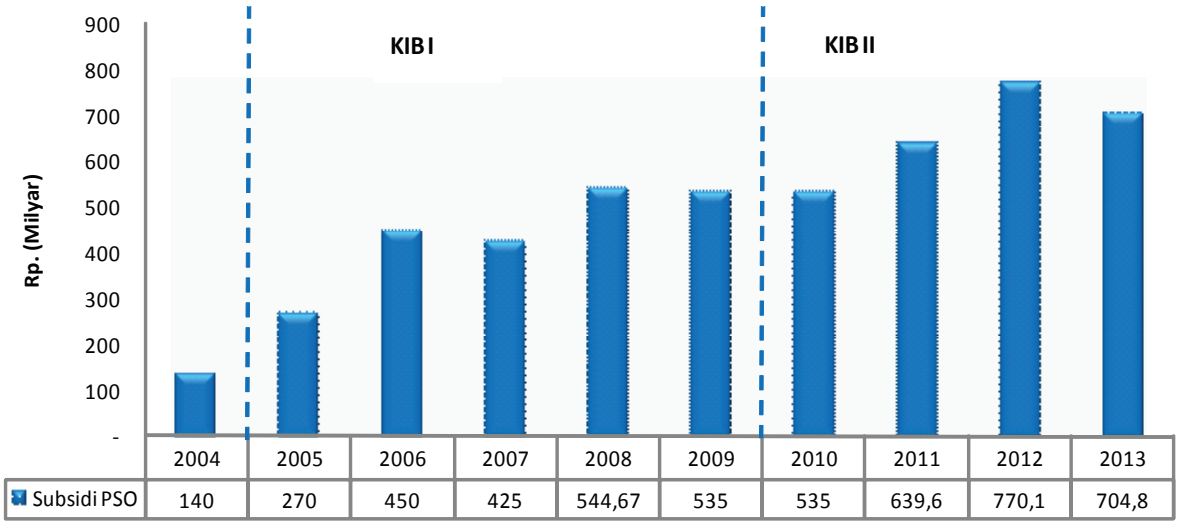

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Subsidi PSO	140	270	450	425	544,67	535	535	639,6	770,1	704,8

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2013

80. Pembangunan sektor infrastruktur komunikasi dan informatika selama dua periode KIB terus ditingkatkan antara lain penyediaan layanan pos universal di 2.298 kantor pos cabang luar kota di tahun 2012; pembangunan pemancar RRI di 138 kabupaten/kota *blank spot* di 28 provinsi pada tahun 2008 dan pemancar TVRI di 30 lokasi *blank spot* pada tahun 2010; penyediaan jasa layanan telepon (Desa Berdering) di 33.184 desa dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan/PLIK) di 5.748 desa yang hingga akhir tahun 2013 masing-masing telah mencapai 93,7 persen dan 103,3 persen dari target; penyediaan jasa internet untuk komunitas (*community access point*) di 222 kabupaten/kota di Jawa Barat, Banten, dan Tangerang; pembangunan pemancar TVRI digital sebagai percobaan siaran digital di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung pada tahun 2008; pembangunan jaringan *broadband backbone* serat optik Palapa Ring di 346 kabupaten/kota di 29 ibukota provinsi atau 69,6 persen dari target 497 kabupaten/kota oleh PT Telkom pada tahun 2012; serta dimulainya pembangunan jaringan *backbone* serat optik Palapa Ring segmen Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

81. Pembangunan infrastruktur energi difokuskan antara lain untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar gas (BBG), yang selain lebih ramah lingkungan sekaligus juga untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Dalam periode KIB I dan II telah dilakukan kegiatan pembangunan anatra lain: (1) pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di 16 kota dengan 57.857 sambungan rumah; (2) pembangunan infrastruktur gas untuk transportasi yang meliputi pembangunan 8 unit SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) di Palembang dan Surabaya, pembagian konverter kit sekitar 3.500 unit, dan rencana pengembangan mobile refueling unit (MRU) sebanyak 4 unit; dan (3) pelaksanan konversi minyak tanah ke LPG selama kurun 2007-2013 dengan total penghematan mencapai sekitar Rp. 85 triliun yang mencakup sekitar 54 juta kepala keluarga.

82. Dalam periode KIB I dan II, kapasitas pembangkit listrik telah ditingkatkan sebesar 18.799 MW sehingga kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional menjadi sebesar 46.428 MW pada tahun 2013, jaringan transmisi tenaga listrik telah ditambah sepanjang 7.302 kms menjadi 38.896 kms di tahun 2013, jaringan distribusi tenaga listrik ditingkatkan sepanjang 154.202 kms menjadi 761.957 kms pada tahun 2013, serta produksi tenaga listrik ditingkatkan menjadi 183,4 ribu GWh pada tahun 2011 dari 120,2 ribu GWh pada tahun 2004. Sehingga rasio elektrifikasi diperkirakan mencapai 80,16 persen di tahun 2013.

Gambar 14
Rasio Elektrifikasi Tenaga Listrik Tahun 2004-2013

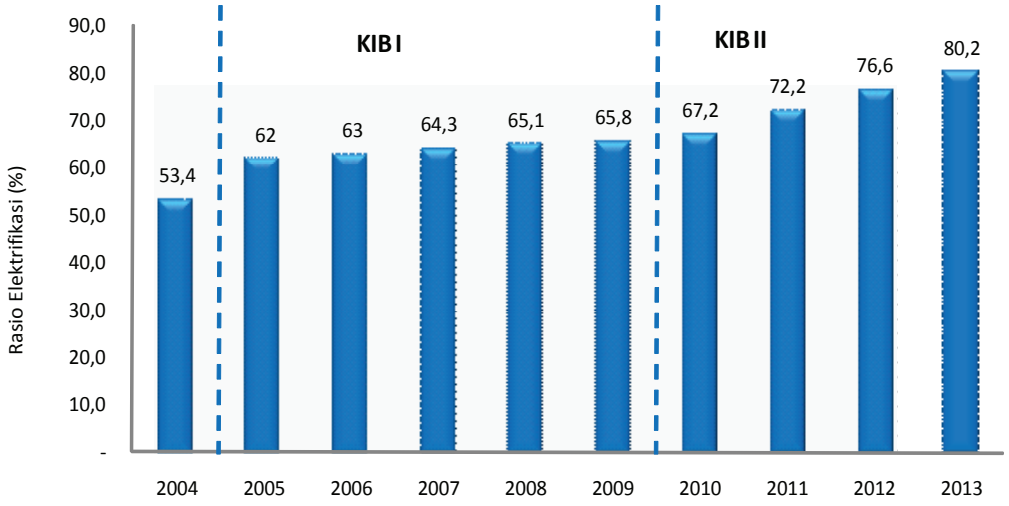

Sumber: Kementerian ESDM, 2013

83. Untuk mendukung ketahanan pangan telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 355,6 ribu 3,2 juta Ha atau rata-rata per tahun sebesar 158 361 ribu ha. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi tersebut masih sebanding dengan laju kerusakan sehingga kondisi jaringan irigasi masih relatif stagnan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas tampungan air telah dibangun 13 buah Waduk dan 792 968 embung yang telah meningkatkan kapasitas tampungan sebesar 4,47 1,2 m3/kapita dari 52,9 m3/kapita. Sementara itu, untuk mendukung tercapainya target MDG's pada tahun 2015, telah dilakukan peningkatan pemenuhan air baku sebesar ± 49,96 m3/detik atau rata-rata 5,55 m3/detik per-tahun sehingga masih diperlukan upaya untuk mencapai kapasitas 56 m3/detik dalam rangka memenuhi target MDG'S (akses air minum rumah tangga) pada tahun 2015 yang sebesar 68,87 persen (capaian saat ini 47,71 persen). Sedangkan untuk mengurangi dampak banjir telah dilakukan pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 2.233,1 km atau rata-rata 248,1 km per-tahun dan pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar sebanyak 121 buah atau rata-rata 30 buah per-tahun yang masih perlu ditingkatkan untuk dapat melindungi sebagian besar areal terdampak akibat banjir dan lahar gunung berapi.

Gambar 15
Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Tahun 2004-2013

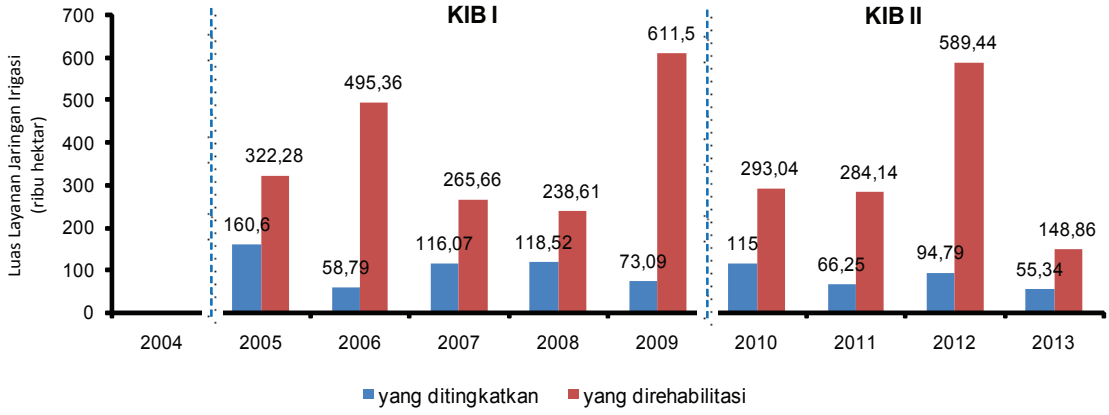

Catatan: Angka capaian 2013 s.d triwulan III
Sumber: BAPPENAS, diolah dari data Kementerian PU, 2013

84. Pembangunan sektor pemukiman diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai dan terjangkau. Pada tahun 2005 telah dibangun sebanyak 52.311 unit mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 174.909 unit. Pembangunan perumahan dilakukan antara lain dengan meningkatkan penyediaan Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi, rumah khusus, rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di 33 Provinsi. Pembangunan Rusunawa dimulai pada tahun 2004 dengan pembangunan sebanyak 12 twin block terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2013 dibangun sebanyak 170 twin block. Adapun pembangunan sektor air minum dan sanitasi dilakukan melalui penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak untuk mengejar target MDGs. Pada tahun 2012 angka akses air minum telah mencapai 58,05 persen dari target MDGs sebesar 68,87 persen pada tahun 2015.

85. Dengan terbatasnya anggaran pemerintah, peran swasta dalam pembangunan infrastruktur terus didorong melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Pada kerangka regulasi dan kelembagaan telah dibentuk KKPPI dan penerbitan Perpres 67 Tahun 2005, penerbitan paket kebijakan infrastruktur dan investasi pada tahun 2006, serta pembentukan lembaga-lembaga pendukung KPS pada periode KIB I. Sedangkan pada periode KIB II telah diterbitkannya Perpres 13 Tahun 2010, Perpres 56 Tahun 2011 dan Perpres 66 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Perpres 67 Tahun 2005 untuk menyelaraskan dengan perubahan peraturan sektoral yang ada. Selanjutnya Pemerintah juga menerbitkan UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk memberikan kepastian proses pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

86. Disamping itu pemerintah terus berupaya untuk mendorong pelaksanaan KPS di Indonesia yang salah satunya melakukan promosi KPS dengan cara: memfasilitasi beberapa kegiatan seminar maupun konferensi seperti: *Infrastructure Summit* (IS) 2005, *Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition* (IICE) 2006, *Asia Pacific Ministerial Conference on PPP for Infrastructure Development* (APMC PPP) 2010, IICE 2012-2013 dan APEC 2013 serta melaksanakan beberapa *market sounding, road show* dan *busssiness forum* proyek-proyek KPS ke beberapa negara. Sejak tahun 2009, Pemerintah menerbitkan PPP Book sebagai instrumen perencanaan dan media informasi bagi pihak swasta untuk proyek-proyek KPS infrastruktur.

87. Selama periode 2004 – 2013, Pemerintah telah melaksanakan proyek struktur melalui skema KPS sebanyak 43 proyek dengan perkiraan total investasi lebih dari Rp 200 triliun termasuk diantaranya jalan tol sepanjang 192 km dengan perkiraan total nilai investasi sebesar Rp 26,4 triliun. Untuk menyiapkan proyek KPS yang baik, pemerintah menyiapkan dukungan seperti: *Viability Gap Fund* (VGF), Jaminan Pemerintah, *land revolving fund*, *land capping fund*, *land acquisiton fund,* fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) dan Fasilitas Dana Geothermal (FDG). Selain itu, lebih dari 250 Kementerian/Lembaga/Pemda telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM sejak 2004-2013.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Perluasan Penciptaan Lapangan Kerja

88. Perluasan lapangan kerja terus didorong dalam 10 tahun terakhir. Perekonomian yang tumbuh tinggi serta berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan langkah-langkah yang ditempuh telah menciptakan lapangan kerja yang luas dan menurunkan tingkat pengangguran. Dalam tahun 2004 – 2013 tercipta lapangan baru sebanyak 17,1 juta. Dengan tambahan angkatan kerja baru sebanyak 14,2 juta, tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 6,3 persen pada tahun 2013. Perluasan lapangan kerja juga diikuti dengan kualitas pekerjaan yang semakin baik. Pekerja formal meningkat dari 30,3 persen pada tahun 2004 menjadi 40,4 persen pada tahun 2013 dan pekerja non-pertanian meningkat dari 56,7 persen pada tahun 2004 menjadi 65,6 persen pada tahun 2013. Perluasan lapangan kerja juga diikuti dengan membaiknya kesejahteraan tenaga kerja sebagaimana yang tercermin dari meningkatnya upah nominal pekerja pada semua lapangan usaha.

Gambar 16
Struktur Pekerja Formal dan Informal Tahun 2004-2013

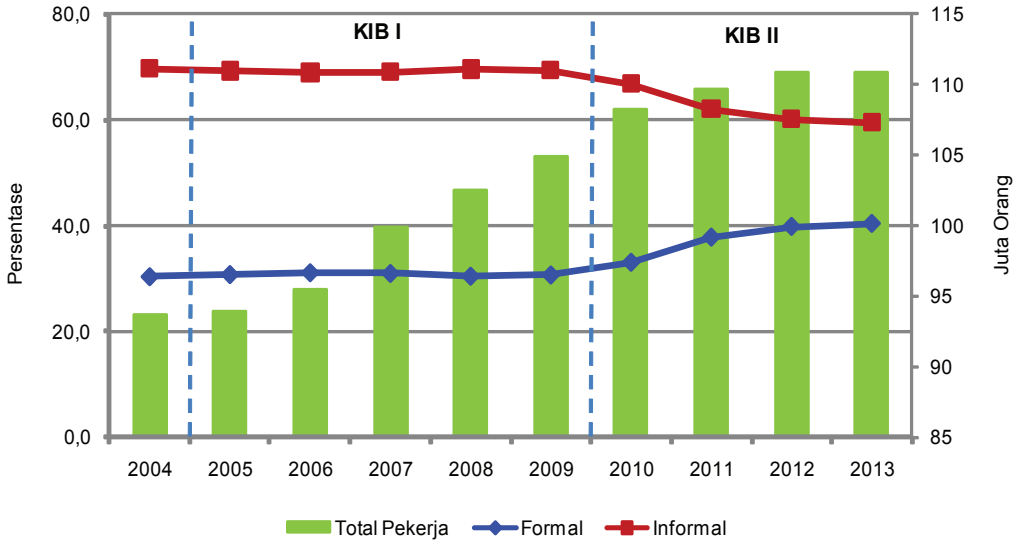

Sumber: BPS

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

89. Jumlah penduduk miskin terus diturunkan. Dalam tahun 2013, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 28,1 juta (11,4 persen), lebih rendah dari tahun 2004 yang masih berjumlah 36,1 juta (16,7 persen). Upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 10 tahun terakhir dihadapkan tantangan yang berat. Gejolak moneter di dalam negeri dan meningkatnya harga minyak mentah dunia pada tahun 2005 telah mengakibatkan tekanan pada perekonomian. Langkah stabilisasi dan perlindungan bagi penduduk miskin mampu menurunkan kembali jumlah penduduk miskin. Selanjutnya melalui penyempurnaan sistem perlindungan sosial ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin), penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Askeskin/ Jamkesmas, dan program kompensasi dan bersifat sementara, jumlah penduduk miskin dapat diturunkan meskipun perekonomian mengalami perlambatan oleh krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008/09.

Gambar 17
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2004-2013

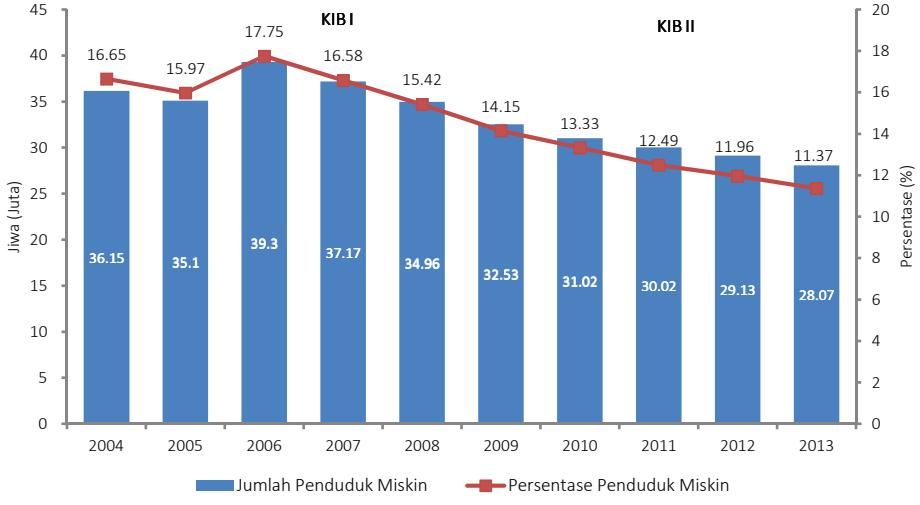

Sumber: BPS, diolah

90. Dalam tahun 2010-2014 dilakukan penyempurnaan lebih lanjut dengan pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan menjadi Klaster I, Klaster II, Klaster III, dan Klaster IV yang bertujuan untuk mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar dan berbasis kewilayahan. Mendatang, efektivitas kebijakan dan program pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan untuk mengatasi perlambatan laju penurunan kemiskinan. Upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program kemiskinan tersebut perlu didukung konsolidasi dan optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi yang dituangkan dalam kerangka Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) untuk mencapai tingkat kemiskinan 4-5 persen pada tahun 2025. Tiga strategi utama MP3KI adalah pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengendalian Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

91. Kebijakan kependudukan dan Keluarga Berencana terus ditingkatkan dengan titik berat pada penguatan kelembagaan di pusat dan daerah, meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas dan merata, serta penguatan data dan informasi kependudukan. Dalam tahun 2000 – 2010, laju pertumbuhan penduduk dapat dijaga sebesar 1,49 persen, relatif sama dengan periode 1990 – 2000 (1,45 persen) serta angka kelahiran dipertahankan sebesar 2,6. Dalam lima tahun terakhir angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) meningkat sebesar 0,5 persen serta kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi telah berhasil diturunkan dari 9,1 persen (2007) menjadi 8,5 persen (2012).

Menuju Jaminan Pelayanan Kesehatan Universal dan Berkualitas

92. Pembangunan kesehatan ditingkatkan dengan menyeimbangkan upaya promosi dan pencegahan (preventif) serta upaya pengobatan (kuratif) dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan universal dan berkualitas. Capaian pada peningkatan kesehatan ibu ditunjukkan dengan penurunan AKI serta perbaikan kinerja program antara lain meningkatnya cakupan kunjungan pertama (K1) dan kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan (K4), meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan.

93. Keberhasilan pada pelayanan kesehatan bayi dan balita ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 35 per 1000 kelahiran hidup (2003) menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup (2012). Penurunan kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) juga diikuti oleh penurunan kematian neonatal (bayi usia dibawah 1 tahun). Dalam pengendalian penyakit TB, Indonesia berhasil mencapai target TB pada MDGs dan mendapat penghargaan internasional. Prevalensi HIV/AIDS dapat dijaga dibawah 0,3 persen melalui pencegahan dan pengobatan. Selain itu lebih dari 50 persen kasus malaria telah berhasil ditekan melalui pengendalian malaria terpadu yang mengintegrasikan pengendalian malaria dengan program kesehatan ibu dan anak. Keberhasilan dalam peningkatan jaminan kesehatan ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah cakupan serta ditetapkannya BPJS dalam pengelolaan jaminan kesehatan serta diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk lebih meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan.

94. Keberhasilan program kesehatan didukung dengan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. Pada KIB I dan KIB II, jumlah maupun kualitas fasilitas kesehatan terus ditingkatkan untuk mendukung penyiapan jaminan kesehatan nasional, terutama faskes di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya pada KIB II (tahun 2010) dikembangkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Peningkatan Status Gizi Masyarakat

95. Perbaikan gizi masyarakat dilakukan melalui pencegahan dan penanggulangan masalah kekurangan gizi, seperti balita kurus (*wasting*), pendek (*stunting*), kelebihan gizi, kurang asupan kalori dan protein, dan anemia gizi besi pada wanita usia subur. Dalam masa KIB I dan II, status gizi masyarakat terus membaik. Prevalensi kekurangan gizi pada balita pada tahun 2007 sebesar 36,7 persen dapat diturunkan menjadi 35,6 persen pada tahun 2010, sedangkan prevalensi balita stunting (pendek dan sangat pendek) pada tahun 2013 sebesar 37,2 persen.

Gambar 18
Prevalensi Kekurangan Gizi, Tahun 2003-2013

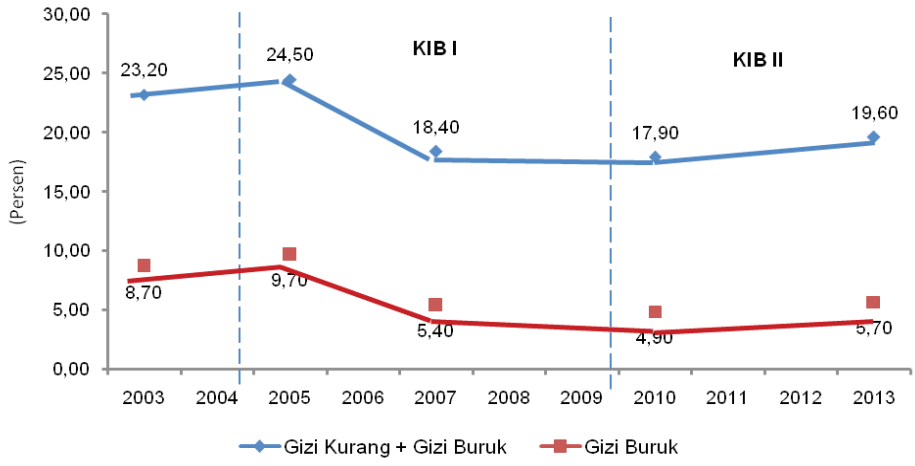

Sumber: Susenas dan Riskesda (Diolah)

96. Pada KIB I disusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi serta Rencana Aksi. Pada KIB II, diluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) dan penurunan prevalensi anak pendek (*stunting*). Intervensi inovatif dalam penanggulangan masalah gizi pada KIB I dilakukan melalui pemberian Taburia dan fortifikasi bahan pangan. Sedangkan dalam rangka peningkatan aksebilitas pangan pada KIB I telah dilakukan pemantapan ketahanan pangan serta peningkatan kemudahan dan kemampuan untuk mengakses pangan melalui penjaminan ketersediaan pangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang. Dalam rangka peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, pada KIB I telah dilaksanakan kegiatan: (1) peningkatan kesadaran keamanan pangan pada masyarakat produsen dan konsumen; (2) peningkatan pengawasan keamanan pangan; dan lain-lain. Pada KIB II dilakukan pengawasan pangan dan jajanan anak sekolah (PJAS) dan pencanangan Gerakan Nasional Menuju PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi.

Penyediaan Pelayanan Pendidikan yang Bermutu dan Merata

97. Pembangunan pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, pendidikan anak usia dini, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Selama KIB I dan KIB II anggaran pendidikan dalam APBN yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer daerah meningkat dari Rp 76,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 331,8 triliun pada tahun 2013. Dengan kenaikan ini, sejak tahun 2009 Pemerintah sudah memenuhi amanat oleh pemenuhan amanat UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan paling tidak 20 persen dari belanja negara.

98. Taraf pendidikan penduduk Indonesia terus meningkat, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun dari 7,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 7,7 tahun pada tahun 2009, dan 8,1 tahun pada tahun 2012. Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang berpendidikan SMP/MTs/sederajat atau lebih tinggi meningkat dari 43,8 persen pada tahun 2004 menjadi 52,1 persen pada tahun 2012. Perbaikan taraf pendidikan tersebut didorong oleh meningkatnya partisipasi pendidikan. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/sederajat meningkat dari 81,2 persen pada tahun 2004 menjadi 98,1 persen pada tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi 103,9 persen pada tahun 2012. Sementara itu APK SMA/MA/SMK/sederajat meningkat dari 48,3 persen pada tahun 2004, menjadi 69,6 persen pada tahun 2009, dan 78,7 persen pada tahun 2012. Dalam periode yang sama APK jenjang pendidikan tinggi meningkat hampir dua kali lipat dari 14,6 persen pada tahun 2004 menjadi 27,9 persen pada tahun 2012.

Gambar 19
Perkembangan APK dan APM menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2004-2013

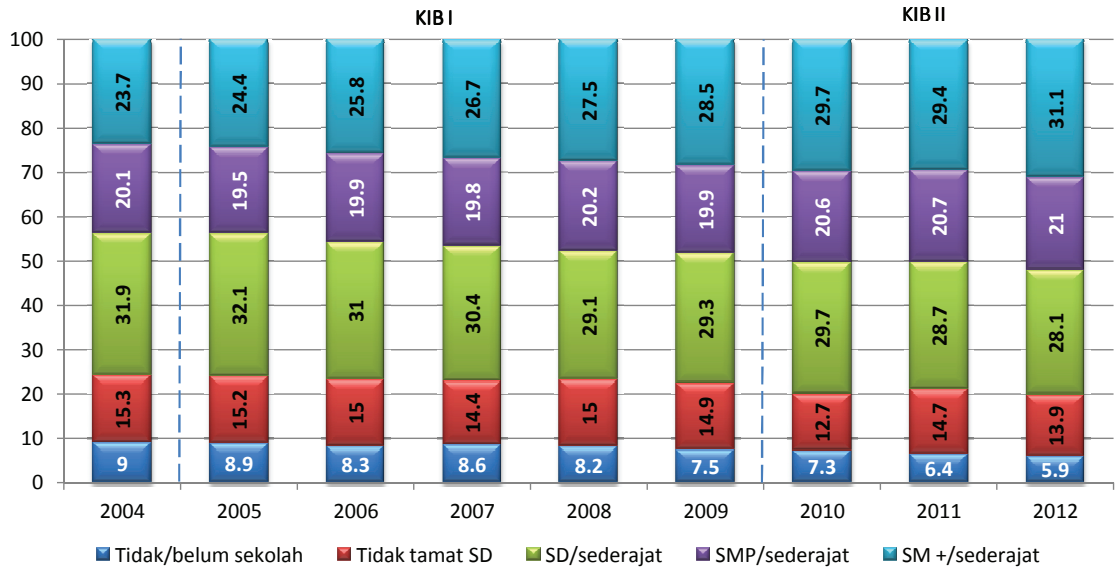

Sumber: Kemendikbud, 2004-2013

99. Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu, KIB I telah menyiapkan kerangka regulasi dengan mengeluarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk memberi landasan peningkatan profesionalisme guru dan dosen. Persentase guru SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah berpendidikan S1/D4 pada tahun 2012 berturut-turut adalah 53,0 persen, 84,5,0 persen, dan 93,3 persen untuk jenjang SMA/SMK, meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 yang berturut-turut baru mencapai 9,0 persen, 54,9 persen, dan 69,2 persen.

100. Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, dalam KIB II telah ditetapkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, telah ditetapkan pula UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dalam rangka menjamin pendidikan kedokteran yang profesional agar mereka mampu meningkatkan pelayanan kesehatan primer secara lebih baik.

Pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga

101. Pembangunan pemuda diarahkan untuk meningkatkan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan, sekaligus membangun karakter pemuda (*character building)*. Pada KIB I, telah disahkan UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang merupakan titik tolak dimulainya era baru dalam membangun pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda, pada KIB I dan KIB II, pemerintah telah memberikan fasilitasi pengembangan kepemimpinan, pelatihan Ketahanan Nasional

Pemuda (Tannasda), pelatihan parlemen pemuda, fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda melalui fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3).

102. Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, membentuk watak bangsa, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga, dalam periode KIBI, telah dibentuk Program Atlet Andalan (PAL). Pada periode KIB II, PAL dilanjutkan dengan Program Indonesia Emas (Prima) yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 22 Tahun 2010 tentang Prima. Dengan adanya program ini, prestasi olahraga meningkat yang ditandai dengan keberhasilan Indonesia menjadi juara umum pada kejuaraan SEA Games tahun 2011 dan *Islamic Solidarity Games* tahun 2013.

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

103. Pada masa KIB I dan KIB II, kebijakan pembangunan bidang agama diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar. Peningkatan kualitas kehidupan beragama antara lain ditunjukkan oleh makin meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan kepada seluruh umat beragama, pemberdayaan lembaga sosial keagamaan, serta meningkatnya pelayanan pelayanan ibadah haji.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

104. Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan untuk memberikan perlindungan terutama kepada kelompok penduduk miskin dan rentan. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan khususnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemerintah memberikan bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

105. Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) yang merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mencakup aspek ekonomi, sosial, good governance dan demokrasi, pembangunan kesejahteraan rakyat menunjukkan kemajuan. IKraR Indonesia meningkat dari 44,0 persen pada tahun 2009 menjadi 48,4 persen pada tahun 2012 (Menko Kesra, 2013).

Gambar 20
Perkembangan IPM Indonesia Tahun 2004-2012

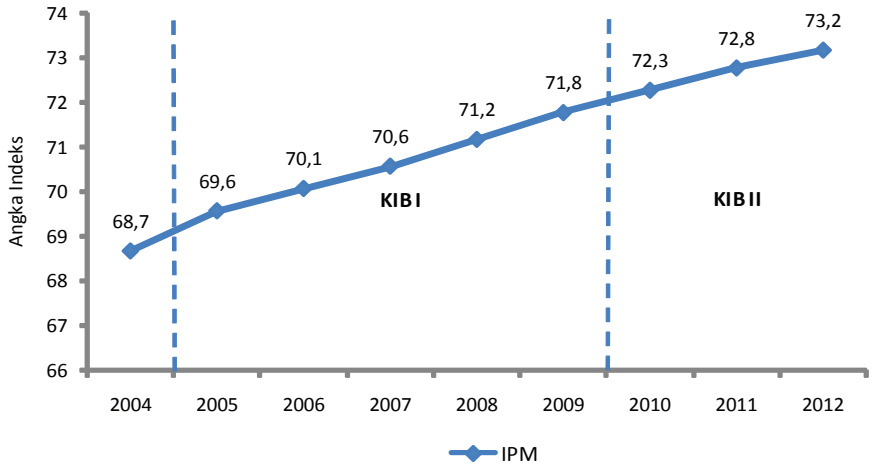

Sumber: BPS, berbagai tahun

106. Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial selama pelaksanaan KIB I diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan meningkatkan pemberdayaan terhadap fakir miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan sosial lainnya. Sedangkan dalam periode KIB II diarahkan untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang terpadu; meningkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaan program-program perlindungan dan kesejahteraan sosial; dan meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti penyandang disabilitas, anak telantar dan lanjut usia telantar, korban bencana alam dan bencana sosial; serta pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

107. Perluasan dan perbaikan mutu pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial merupakan salah satu capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dalam memenuhi hak dan mewujudkan kemandirian PMKS, khususnya bagi anak dan lanjut usia telantar, serta penyandang disabilitas miskin. Pelayanan sosial bagi anak miskin dan telantar diberikan antara lain melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi diri dan kreativitas anak, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga, dan penguatan manajemen lembaga kesejahteraan sosial anak.

108. Data PPLS 2011, menunjukkan bahwa sekitar 23 juta anak hidup dalam rumah tangga miskin yang rentan terhadap berbagai resiko antara lain seperti dipekerjakan, menjadi korban atau terlibat tindakan kriminal. Oleh karena itu, mulai tahun 2010 dilaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi sekitar 330 ribu anak dalam bentuk pelayanan sosial bagi anak balita dan anak telantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak disabilitas dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK).

109. Pelayanan dan rehabilitasi sosial diberikan pula bagi penduduk lanjut usia telantar. Selama tahun 2010-2012, pelayanan sosial lansia diberikan melalui panti maupun day care dan home care, atau pelayanan dan pendampingan bagi lansia yg tinggal sendiri/bersama keluarga, serta bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT) untuk lanjut usia miskin dan telantar.

110. Untuk meningkatan fungsi sosial dan mengatasi permasalahan penyandang disabilitas, Pemerintah menerbitkan UU No. 19/2012 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities), dan turut serta menandatangani Agenda Aksi Dekade Kedua negara-negara Asia Pasifik yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat (2004-2013). RAN ini merupakan komitmen pemerintah demi tercapainya tujuan dalam memajukan, melindungi, menjamin hak asasi dan kebebasan secara penuh dan setara, serta memajukan penghormatan penyandang disabilitas.

111. Survei yang dilakukan Lembaga Demografi tahun 2012, menunjukkan bahwa 83,1 persen disabilitas tergolong berat, terutama kelompok disabilitas perempuan, berusia di atas 60 tahun, tinggal di perdesaan, dan berpendidikan rendah. Bagi penyandang disabilitas miskin yang tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan/Disabilitas berat (ASODK).

112. Efektivitas pelayanan para pendamping dan pekerja sosial baik profesional maupun yang berdasarkan kerelawanan, ditunjukkan dari hasil-hasil kegiatannya yang dirasakan sangat bermanfaat baik oleh lembaga pelayanan sosial maupun PMKS yang menjadi target pelayanan, seperti melakukan pemantauan manfaat bantuan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, akte kelahiran, dan akses layanan dasar lainnya, serta pendampingan pengembangan usaha produktif.

113. Pemberdayaan sosial untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT), dilaksanakan melalui pemberdayaan lingkungan sosial dalam pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan SDA dan lingkungan sebagai sumber penghidupan warga; perlindungan berkaitan dengan upaya advokasi, regulasi dan legislasi dalam rangka penguatan identitas dan kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya warga KAT; dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pemetaan sosial, studi etnografis, pemrograman dan kesiapan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar dan ekonomi produktif.

Peningkatan Perlindungan Anak

114. Perlindungan Anak ditujukan untuk memenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

115. Kebijakan perlindungan anak dalam KIB I diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, Sedangkan dalam KIB II kebijakan perlindungan anak lebih diarahkan kepada peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, perlindungan anak dari tindak kekerasan, serta kelembagaan perlindungan anak.

116. Keberhasilan perlindungan anak dapat dilihat dari aspek tumbuh kembang dan kualitas hidup anak, perlindungan anak dari tindak kekerasan, serta kelembagaan perlindungan anak. Peningkatan tumbuh kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak dalam aspek kesehatan ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan anak di era KIB I dan KIB II. Sedangkan dari aspek pendidikan terlihat kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

117. Pencatatan kelahiran mengalami peningkatan pada KIB I sebesar 52,2 persen menjadi sebesar 59 persen pada KIB II. Pada Era KIB II, terdapat kemajuan dalam perlindungan anak seperti disahkannya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terbentuknyaForum Anak Nasional dan Forum Anak Daerah di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan,peningkatan kualitas dan ketersediaan data melalui survey kekerasan terhadap anak (SKTA) dan diterbitkannya buku profil anak, serta peningkatan jumlah pekerja anak yang ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) dan dikembalikan kepada satuan pendidikan.

118. Upaya lain dalam mewujudkan perlindungan anak adalah dengan disahkannya berbagai peraturan yang terkait dengan perlindungan anak. Selain itu, upaya peningkatan koordinasi antar lembaga dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak mengalami kemajuan melalui lahirnya Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 (PNBAI), Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), dan terbitnya Perpres No 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).

119. Sedangkan dalam rangka percepatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada akhir KIB I telah ditetapkan Permen PP No.2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Upaya ini dilanjutkan pada Era KIB II, sehingga pada tahun 2013 telah terbentuk 104 kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak (KLA), dimana 4 kab/kota diantaranya sudah mencapai tahap Nindya.

Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

120. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) untuk mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel baik laki-laki maupun perempuan. Keberhasilan peningkatan kesetaraan gender ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index* (GDI), serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM).

Gambar 21
Perkembangan IPG Indonesia Tahun 2004-2011

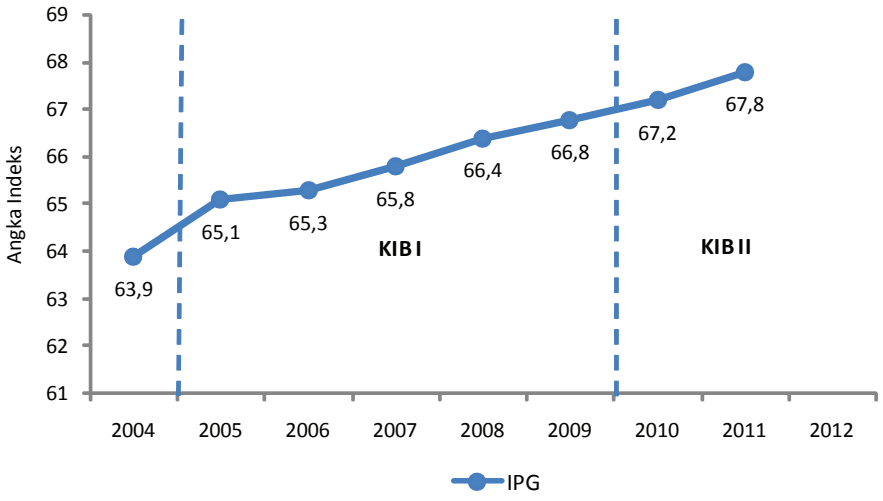

Sumber: BPS, berbagai tahun

121. Arah kebijakan periode KIB I adalah peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, sementara pada periode KIB II, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

122. Selama periode KIB I sampai dengan KIB II, hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan adalah meningkatnya rasio APM perempuan terhadap APM laki-laki dari tahun 2009 sampai bulan Maret tahun 2013. Capaian lainnya antara lain pemberantasan buta aksara perempuan, serta pengintegrasian gender di dalam pendidikan termasuk pendidikan agama.

123. Di bidang kesehatan, pada periode KIB I, dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, telah ditetapkan berbagai regulasi tentang pedoman, pelaksanaan, dan revitalisasi Gerakan Sayang Ibu, termasuk dukungan transportasi rujukan. Di samping itu, pada periode KIB II, Kementerian PP dan PA telah menetapkan Pedoman PPRG dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, Bahaya NAPZA, serta bidang Keluarga Berencana.

124. Di bidang politik dan pengambilan keputusan, proporsi keterwakilan perempuan di DPR meningkat dari sebesar 11,3 persen pada periode KIB I menjadi sebesar 18,4 persen pada periode KIB II. Di samping itu, persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon IV masing-masing sebesar 9,6 persen, 6,6 persen, 13,7 persen, dan 22,4 persen meningkat menjadi 16,4 persen, 12,8 persen, 19,6 persen, dan 32,4 persen masing-masing untuk jabatan eselon I sampai dengan eselon IV pada periode KIB II (Januari 2013).

125. Di bidang hukum dan HAM, selama periode KIB I sampai dengan KIB II, telah disusun Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, telah ditandatangani MoU tentang akses keadilan bagi perempuan korban, yang melibatkan peran serta dari semua institusi Penegak Hukum di Peradilan Umum.

126. Di bidang ekonomi, hasil yang telah dicapai adalah meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dari sebesar 49,2 persen (Sakernas 2004) menjadi 51,0 persen pada periode KIB I (Sakernas 2009) dan menjadi sebesar 51,39 persen pada periode KIB II (Sakernas 2012).

127. Dari sisi kebijakan/perencanaan pembangunan telah dikembangkan *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau piranti analisis gender, disusunnya Indonesia *Gender Equality Assessment* (IGEA) *Policy Briefs* (2011) dan *Policy Paper: Gender Mainstreaming in Climate Change Adaptation* (GMCCA)/Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUG API) dan Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) pada tahun 2012.

128. Selama periode tersebut telah terbentuk dan berfungsinya lembaga-lembaga untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 28 provinsi dan 242 kabupaten/kota, Ruang Pelayanan Khusus (RPK)/Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 451 polda dan polres, *Crisis Centre/Women Trauma Centre* sebanyak 22 buah, Pusat Krisis Terpadu (PKT) bagi perempuan korban kekerasan berbasis Rumah Sakit di 20 Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal, serta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di 42 Rumah Sakit Polri.

129. Dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, selama periode KIB I sampai dengan KIB II, telah ditetapkan regulasi tentang pelaksanaaan PUG di daerah melalui Permendagri, Pergub dan Perda. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG, perspektif gender diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran, dengan dikeluarkannya Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG (Stranas PPRG) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat Anggaran Responsif Gender.

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

130. Pembangunan bidang agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonis antarkelompok masyarakat agar terwujud kehidupan harmoni sosial dalam masyarakat. Untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama pada periode KIB I dan KIB II telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan langkah berupa pembentukan aturan sebagai rambu-rambu dalam pengembangan agama, peningkatan penerangan agama, dialog intern dan antar tokoh-tokoh agama, kerjasama lintas agama, peningkatan wawasan multikutural bagi guru-guru dan penyuluh agama, pemberdayaan forum-forum kerukunan umat beragama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah telah mengatasi berbagai aksi konflik dan mengungkap jaringan terorisme. Puncak keberhasilan pemerintah menjaga suasana yang aman dan damai adalah keberhasilan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan sebagai Negarawan Dunia Tahun 2013 dari *Appeal of Conscience Foundation* (ACF) sebagai wujud apresiasi dunia terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Tantangan ke depan dalam peningkatan kerukunan umat beragama antara lain adalah menciptakan suasana yang rukun, aman, dan damai antarumat beragama, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kerukunan umat beragama.

Pengelolaan Keragaman Budaya

131. Pembangunan kebudayaan diarahkan pada penguatan jati diri bangsa dalam kerangka keragaman dengan dititikberatkan pada upaya peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, serta mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya. Keberhasilan dalam mengelola keragaman budaya antara lain adalah meningkatnya kualitas pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan candi Borobudur, candi Prambanan dan kawasan situs manusia purba Sangiran, meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum dan perpustakaan di seluruh provinsi, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya seni budaya dan perfilman yang ditandai oleh penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pagelaran, dan pentas seni dan film, pemberian penghargaan di bidang seni dan film, serta pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional sebagai bentuk promosi kesenian nasional Indonesia.

132. Pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia terus meningkat. Pengakuan UNESCO terhadap hasil karya budaya bangsa diberikan untuk Keris (2005), Batik (2009), dan Angklung (2010) sebagai *Intangible Cultural Heritage of Humanity*, Tari Saman (2011) dan Noken (2012) sebagai *Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*; serta Lanskap Budaya Bali (Subak) sebagai *World Cultural Heritage* (2012). Selanjutnya pada tahun 2013, telah diselenggarakan *World Culture Forum* di Bali yang digagas oleh Presiden Soesilo

Bambang Yudhoyono serta peran Indonesia dalam diplomasi kebudayaan di dunia internasional. Forum tersebut menghasilkan *'Bali Promise'* yang menyerukan pada negara/pemerintah di dunia untuk berkomitmen agar mengintegrasikan budaya dalam Agenda Pembangunan yang Berkelanjutan Paska 2015. Tantangan ke depan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, antara lain adalah memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisi luhur, meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya, meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, dan meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan.

MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

133. Keberlanjutan pembangunan ditentukan oleh keseimbangan pengelolaan sumber daya pembangunan agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia berkualitas, serta memelihara kualitas lingkungan hidup untuk keberlanjutan kehidupan. Pada periode KIB I dan KIB II, keberlanjutan pembangunan dijaga dan ditingkatkan dengan menerapkan strategi *pro-growth, pro-employment, pro-poor,* dan *pro-environment* secara seimbang. Pada masa KIB I, pelaksanaan ditekankan pada prinsip keberlanjutan dengan melakukan penataan tata kelola pembangunan dan pada periode KIB II pelaksanaan dtekankan pada strategi *pro-environment* agar keseimbangan keempat strategi dapat dijaga dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan *(sustainable growth with equity)*.

134. Kebijakan dan langkah untuk memelihara keberlanjutan dilakukan dengan: (i) memelihara kekayaan sumberdaya alam dan (ii) mengendalikan kualitas lingkungan dan daya tahan pembangunan.

135. Pemeliharaan kekayaan sumber daya alam dilakukan melalui konservasi sumber daya hutan, konservasi sumber daya laut dan pesisir; serta menjaga kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Pemeliharaan kekayaan sumber daya alam dalam KIB I ditandai dengan konservasi sumberdaya hutan melalui gerakan rehabilitasi hutan (Gerhan), pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan Pemantapan kawasan hutan. Pada periode KIB II (2010-2014) pembangunan kehutanan diarahkan lebih terpadu melalui pengelolaan hutan berkelanjutan agar hutan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Langkah strategis yang ditempuh adalah melanjutkan Gerhan dengan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang didukung dengan penghutanan kembali/reforestasi dengan partisipasi masyarakat melalui hutan kemasyarakatan, dan penanaman semiliar pohon setiap tahun (*One Billion Indonesian Trees/OBIT*). Pada masa KIB II pengendalian kebakaran hutan dilakukan terpadu dengan penerapan sistem kebencanaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

136. Capaian penting dalam pemeliharaan kekayaan sumber daya alam antara lain: (i) berrhasil diturunkannya laju deforestasi pada masa KIB I yaitu pada periode 2003-2006 yang mencapai 1,17 juta ha per tahun hingga 0,83 juta ha per tahun pada periode 2006-2009 atau turun sebesar 70 persen. Penurunan rata-rata laju deforestasi dalam dua periode tersebut mencakup kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Selanjutnya pada masa KIB II, rata-rata laju deforestasi berhasil diturunkan lebih lanjut hingga mencapai 0.45 juta ha per tahun pada periode 2009-2011. Keberhasilan Rehabilitasi Lahan melalui penanaman pohon di kawasan hutan dan non-kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia telah menurunkan luas lahan sangat kritis sebesar 1,62 juta ha, yaitu dari 6,89 juta ha pada tahun 2006 menjadi 5,27 juta ha pada tahun 2012.

Gambar 22
Rerata Laju Deforestasi Indonesia dalam Periode KIB I dan KIB II (Juta ha)

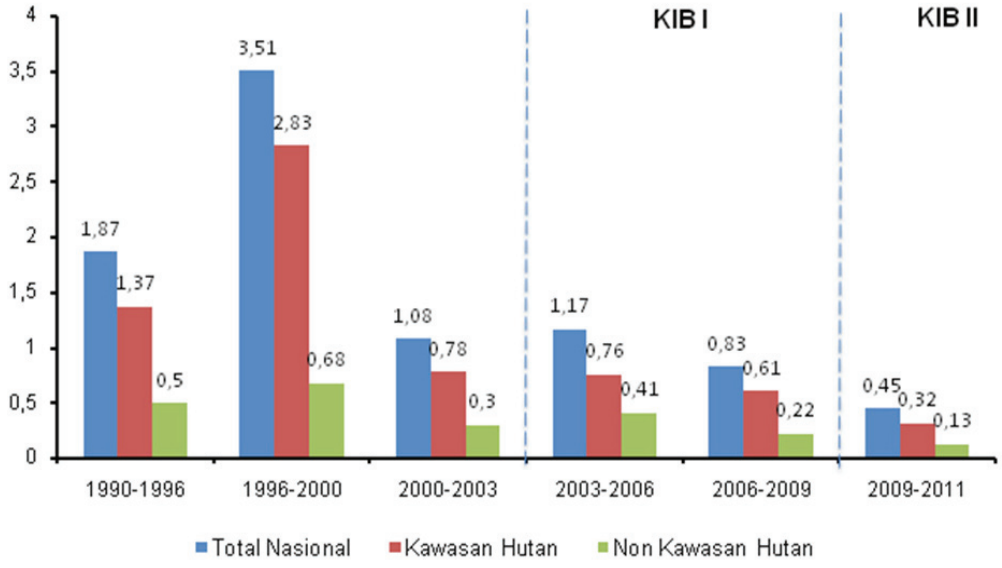

Sumber: Kemenhut, diolah

137. Pelaksanaan pengendalian kebakaran pada masa KIB II yang lebih terpadu, telah berhasil menurunkan jumlah *hotspot,* dari 61 ribu di tahun 2004 menjadi 39 ribu pada tahun 2009. Selanjutnya, pada kurun KIB I dilakukan penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) yang berisikan keterpaduan dalam penyusunan dan penetapan rencana kegiatan; keterpaduan penyusunan program-program kegiatan di DAS; keterpaduan program-program kegiatan pemerintah pusat dan daerah; serta keterpaduan dalam pengendalian pelaksanaan program kegiatan. Pada masa KIB II, 108 RPDAST untuk seluruh DAS kritis telah berhasil diselesaikan.

138. Partisipasi masyarakat dalam melakukan reforestasi juga meningkat, yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah HKm dan HD seluas 500.377 ha pada tahun 2012. Pembangunan HKm dan HD pada tahun 2013 telah ditingkatkan hingga mencapai areal seluas 500 ribu ha. Secara kumulatif, jumlah HKm dan HD yang telah dibangun seluas 1,54 juta ha dari target 2,5 juta ha pada akhir tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga membangun Hutan Rakyat (HR) kemitraan di luar kawasan hutan seluas 56,33 ribu ha pada tahun 2012 dan tahun 2013 ditingkatkan seluas 50 ribu ha. Secara kumulatif, jumlah HR yang telah dibangun hingga 2012 menjadi 158,49 ribu ha dari target 250 ribu ha pada akhir tahun 2014.

139. Berkaitan dengan kelautan dan pesisir, pada masa KIB I, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Pada masa KIB II, kebijakan konservasi sumber daya kelautan diarahkan secara lebih terintegrasi. Tindak lanjut dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga semakin ditingkatkan untuk mendukung konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan.

140. Pada KIB I, luasan kawasan konservasi perairan meningkat dari 5,4 juta ha (2004) menjadi 13,5 juta ha (2009). Selanjutnya pada KIB II, meningkat menjadi 16,1 juta ha. Pada KIB I, luasan kawasan konservasi perairan meningkat dari 5,4 juta ha (2004) menjadi 13,5 juta ha (2009). Selanjutnya pada KIB II, meningkat menjadi 16,1 juta ha.

Gambar 23
Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola secara Berkelanjutan (juta Ha)

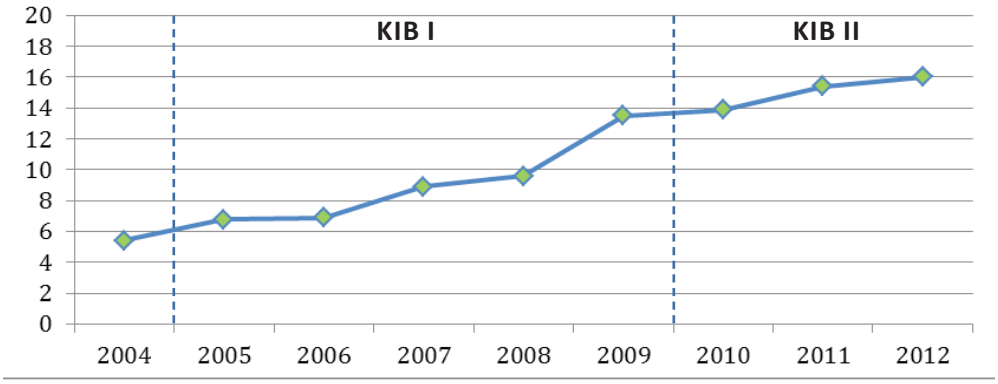

Sumber: Buku Laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I dan KIB II Bidang Kelautan dan Perikanan, KKP 2013

141. Kepedulian Indonesia terhadap kelestarian terumbu karang diakui dunia. Pada tanggal 24 September 2012, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menerima penghargaan "*Award Dinner Valuing Nature; Award for Leadership in* CTI", di New York, Amerika Serikat dari Konsorsium *Non Government Organization* (NGO), sebagai inisiator CTI-CFF yang dibentuk pada tahun 2007. Sebagai upaya integrasi antar instansi dalam pengelolaan ekosistem mangrove, telah ditetapkan Perpres No. 73 Tahun 2013 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

142. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan diinternalisasikan ke berbagai sektor dalam bentuk perlindungan keanekaragaman hayati. Penerapannya terus ditingkatkan, dengan memadukan iptek, *resources based, knowledge based* dan *culture based*, secara berkualitas.

143. Beberapa Undang-Undang telah ditetapkan terkait komitmen Indonesia di dunia internasional, antara lain: (1) UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto; (2) UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety*; (3) PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; dan (4) UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.

144. Upaya konservasi terus dilakukan melalui penetapan kawasan-kawasan konservasi sebagai tempat perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, meliputi: cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata, taman hutan raya dan taman buru. Luas kawasan konservasi tersebut pada tahun 2007 mencapai 27.958 juta hektar yang tersebar di 532 unit. Pada periode KIB II, kawasan cagar alam yang saat ini berjumlah 238 unit; dan suaka margasatwa sebanyak 74 unit; taman nasional (darat dan laut) sebanyak 50 unit.

145. Untuk menambah daya tampung *ex-situ* konservasi tumbuhan, Pemerintah melalui Inpres No. 3 Tahun 2009 menetapkan perlunya setiap propinsi untuk memiliki kebun raya daerah. Pada saat ini, terdapat sebanyak 25 kebun raya yang tersebar di 17 propinsi dan mencapai luas 3.000 hektar. Pelestarian keanekaragaman hayati lokal dilakukan melalui pembentukan Taman Kehati diluncurkan pada tahun 2007. Beberapa Taman Kehati menjadi identitas daerah, misalnya gandaria (Jawa Barat), salak (DKI Jakarta), bunga kantil (Jawa Tengah), pohon kepel (DI Yogyakarta), lontar (Sulawesi Selatan), eboni (Sulawesi Tengah), bunga bangkai (Bengkulu), dan lainnya.

146. Sejalan dengan ketentuan di tingkat global, dalam periode KIB I telah diterbitkan UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (*Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change*) dan UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan

Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Di tingkat operasional telah pula diterbitkan PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) 2007.

147. Dalam KIB II, peranan keanekaragaman hayati dalam untuk sumber ekonomi nasional, seperti untuk pangan, farmasi, kosmetika, biomaterial, dan energi dikembangkan. Sekitar 40 persen populasi Indonesia menggunakan pengobatan tradisional yang menggunakan kekayaan keanekaragaman hayati. Dari sekitar 30.000 jenis tumbuhan, tercatat paling tdak ada sebanyak 7.500 jenis tumbuhan telah digunakan secara turun-temurun dalam sistem pengobatan tradisional berbagai etnik di tanah air. Nilai ekonomi obat tradisional Indonesia sebesar US$113 juta untuk produk ekspor dan US$100 juta untuk penggunaan domestik (Badan POM, 2007).

148. Dalam periode KIB II telah dibangun koleksi kultur mikroba yang disimpan di *Indonesian Culture Collection* (InaCC), yang mendukung kegiatan bioteknologi. InaCC memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah hilangnya sumber daya hayati Indonesia melalui konservasi ex-situ dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk kegiatan dalam ruang lingkup penelitian dan pengembangan, pendidikan. Pada tahun 2011 telah dikembangkan pula model pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) SDGPT Indonesia dalam bentuk *Indonesian Genetic Resources and Traditional Knowledge* (I-Grest) yang berisi peta kekayaan SDG Indonesia sebagai sarana *defense protection* dari sumber daya yang dimiliki Indonesia.

149. Pengendalian kualitas lingkungan dan daya tahan pembangunan dilakukan melalui pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan bencana serta perubahan iklim sangat penting dilakukan.

150. Kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan pada periode KIB I diarahkan pada pengarusutamaan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada semua bidang pembangunan. Dalam kurun waktu KIB II kebijakan tersebut terus ditingkatkan, dengan rencana pelaksanaan yang terpadu dan konkrit, didukung pengembangan instrumen pelaksanaannya. Untuk memperkuat kebijakan, Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara komprehensif telah mencakup hampir seluruh aspek dalam perspektif lingkungan dan penerapan prinsip berkelanjutan.

151. Langkah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah diperkenalkannya instrumen untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sampai dengan tahun 2012 telah diselesaikan sebanyak 12 KLHS, antara lain KLHS untuk Rencana Tata Ruang Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, Yogyakarta; rencana pengembangan Kota Padang Bay di Sumatera Barat; dan RPJMD Kota Serang, Banten. Hasil strategis lainnya adalah perubahan pengaturan analisis dampak lingkungan, yang semula berupa kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi ijin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

152. Pengelolaan sampah dilakukan secara nyata dan sistematis yang diatur melalui PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selama tahun 2011-2012, telah terjadi penurunan volume sampah sebesar 10,7 persen dari total timbulan sampah. Capaian ini sejalan dengan target penurunan timbulan sampah yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yaitu penurunan sebesar 7 persen dari timbulan sampah nasional.

153. Langkah strategis lain dalam periode KIB II adalah penyusunan indikator lingkungan hidup terpadu, dengan mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas lingkungan di tingkat Provinsi yang meliputi tiga indikator utama, yaitu kualitas udara (IKU), kualitas air (IKA), dan tutupan hutan (IHT). Setelah IKLH ditetapkan pada akhir KIB I (2009) di setiap Provinsi di Indonesia, skor IKLH terus meningkat setiap tahunnya.

154. Dengan semakin kompleksnya kegiatan masyarakat, upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup di daerah ditingkatkan. Sampai dengan tahun 2013 kelembagaan lingkungan hidup daerah yang berbentuk badan ada di 33 di tingkat provinsi dan 303 di tingkat kabupaten/kota, berbentuk kantor berjumlah 149 kabupaten/kota,

dan yang berbentuk lainnya (diluar badan dan kantor) berjumlah 30 kabupaten/kota. Lima (5) kantor regional ekoregion, yaitu Yogyakarta (wilayah Jawa), Bali (wilayah Bali, Nusa Tenggara), Makasar (wilayah Sulawesi, Maluku, Papua), Pekanbaru (wilayah Sumatera) dan Balikpapan (wilayah Kalimantan), serta pada tahun 2013 didirikan pula kantor regional di Papua (wilayah Papua, menjadi terpisah dengan yang kantor regional di Makassar). Kantor ekoregion juga dilengkapi dengan laboratorium lingkungan, tenaga ahli di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta instrumen lain yang mendukung peran BLHD di Provinsi.

155. Menjelang akhir KIB II, langkah terpadu dalam penerapaan prinsip berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SCP). Berkaitan dengan ini, pada tahun 2013, Pemerintah telah meluncurkan Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (10 *Year Framework Programme on SCP*/10YFP-SCP). Kerangka Kerja ini memuat peta jalan Indonesia dalam periode 2013-2023 untuk pengarusutamaan SCP 2013-2023 ke dalam agenda pembangunan nasional.

156. Berkaitan dengan pengelolaan bencana, Pemerintah dan DPR secara sistematis menyusun landasan penanganan bencana yang ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam masa ini pula telah dibentuk lembaga yang khusus menangani penanggulangan bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk pelaksanaan telah pula dibentuk 33 BPBD tingkat provinsi dan 441 BPBD kabupaten/kota.

157. Penataan kelembagaan pengelolaan bencana ini telah berhasil menangani pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Yogyakarta dan Jawa Tengah serta bencana Merapi dan di berbagai tempat lainnya. Berbeda dengan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan di Aceh dan Nias yang dilaksanakan secara terpusat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa bumi di Jateng dan DIY menekankan peran masyarakat. Pola pembangunan dan perbaikan rumah berbasis pemberdayaan masyarakat ini selanjutnya menjadi model rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan sampai saat ini.

158. Pada periode KIB II dibentuk satuan reaksi cepat untuk bencana, yang berlandaskan Instruksi Presiden tentang Program 100 hari Presiden RI untuk membentuk Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB). SRC-PB diperkuat dengan 500 personil yang berasal dari TNI/Polri dan perwakilan kementerian/lembaga yang siap dimobilisasi 24 jam. Pembentukan SRC-PB telah menyumbang peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada tahun 2011 dilaksanakan kegiatan *ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise Tahun 2011 (ARF Direx 2011)* yang merupakan latihan bersama kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, dilaksanakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

159. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi bencana Aceh dan Nias serta Jogyakarta dan diikuti dengan langkah pengelolaan yang lebih sistematis dan komprehensif, mendapat pengakuan di dunia internasional. Pada sidang PBB tentang *Global Forum for Disaster Risk Reduction* tahun 2012, Presiden RI mendapatkan penghargaan internasional *Global Champion for Disaster Risk Reduction.*

160. Pengakuan internasional juga tercermin pada kepercayaan dunia kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi dua tahunan tingkat Menteri Asia melalui pada tahun 2012, yaiu *5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (5th AMCDRR).* Konferensi dilaksanakan di Yogyakarta dengan tema Penguatan Kapasitas Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana (*Strengthening Local Capacity for Disaster Risk Reduction*). Konferensi diikuti oleh 72 Negara, 366 organisasi dalam dan luar negeri, 3.000 peserta teregistrasi, 820 orang diantaranya berasal dari luar negeri. Dalam Konferensi ini dihasilkan *Jogjakarta Declaration.*

161. Capaian lain dalam KIB II adalah perluasan pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Semula TMC hanya digunakan untuk mengairi sawah, dan kemudian waduk untuk menjaga produksi pertanian, maka pada KIB II teknologi modifikasi cuaca digunakan pula untuk mengelola hujan untuk kepentingan lain yaitu mencegah bencana banjir (di DKI Jakarta) dan menunda/mencegah hujan untuk kelangsungan penghelatan besar nasional.

162. Berkaitan dengan perubahan iklim, pada periode KIB I Indonesia berhasil menjadi tuan rumah (*host*) konferensi Perubahan Iklim se-dunia *Conference of the Parties* (COP-13) di Bali pada tahun 2007, dan melahirkan Bali Action Plan 2007.

163. Pada KIB II, Presiden sudah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah berhasil dirumuskan secara konkrit dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan inventarisasinya melalui Perpres 61/2011. Rencana aksi tersebut berisi: (i) alokasi target penurunan emisi pada 5 (lima) sektor utama yaitu kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi dan transportasi, industri dan limbah; serta (ii) identifikasi program dan kegiatan langsung maupun yang tidak langsung menghasilkan penurunan emisi GRK, serta K/L penanggungjawabnya secara jelas. Untuk pelaksanaan di daerah, 32 Pemda provinsi juga telah menyusun RAD GRK pelaksanaan konkrit di lapangan.

164. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan REDD+, yang menjadi bagian dari RAN GRK, telah dikeluarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2011 yang diperpanjang dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang "Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut", serta pembentukan kelembagaan data dan mekanisme *data sharing* (*One Map System*). Di samping itu, juga telah diterbitkan Keppres Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan REDD+ yang secara khusus mempunyai tugas untuk membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan pemantauan, pengawasan, serta pengendalian REDD+ di Indonesia.

165. Untuk melakukan koordinasi dan keterpaduan serta mendukung pelaksanaan RAD GRK dan RAN GRK, pada akhir periode KIB I (2009) telah dibentuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF). Pada saat ini ICCTF mendapat dukungan mitra pembangunan dan pada tahun 2010-2011 telah membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi di 28 lokasi di seluruh Indonesia. Pada pada tahun 2012-2014 kegiatan dengan pembiayaan ICCTF tersebar di 11 provinsi, sehingga kegiatan perubahan iklim untuk percontohan masyarakat akan terus meningkat.

166. Kapasitas pengendalian perubahan iklim terus diperkuat dengan *Meteorological Early Warning System* (MEWS) dan *Tropical Cyclone Warning Centre* (TCWC). Pada saat ini waktu pelayanan informasi peringatan cuaca ekstrim sudah mencapai 2,5 jam, dan capaian kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami sudah meningkat dari 15 menit sampai dengan ≤ 5menit sebelum terjadinya bencana.

MENGEMBANGKAN DAN MEMERATAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

167. Pembangunan daerah dalam masa KIB I dan II diarahkan untuk mengurangi kesenjangan; meningkatkan koordinasi pembangunan antarsektor dan antardaerah; meningkatkan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, serta mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah.

168. Pembangunan daerah telah mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pemerataan pelayanan dasar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan mempertahankan momentum di Kawasan Barat Indonesia (KBI); serta mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan.

169. Dalam rangka mempercepat pembangunan KTI dan mempertahankan momentum di KBI, keberpihakan terhadap pembangunan dan pengembangan wilayah tertinggal, terpencil, terdepan, terluar, dan perbatasan ditingkatkan; pertumbuhan wilayah luar Jawa-Bali dan Sumatera didorong dengan menjaga momentum pertumbuhan ketiga wilayah tersebut; pemerataan sarana prasarana dan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar ditingkatkan; serta wilayah laut dan sektor-sektor kelautan dikembangkan.

170. Dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan, percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh terus didorong, serta keberpihakan pemerintah pada daerah tertinggal; penciptaan lapangan kerja; dan aksesibilitas dan keberdayaan masyarakat ke sumber-sumber daya produktif, ditingkatkan.

171. Dalam masa KIB I dan KIB II, KTI mengalami percepatan pertumbuhan dan sebagian besar dari pertumbuhan tersebut ditopang pertumbuhan Sulawesi yang tinggi, KBI secara umum mengalami pertumbuhan stabil dengan pola yang relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi KTI terhadap perekonomian nasional terus meningkat walaupun KBI tetap memiliki kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, baik KTI dan KBI memiliki PDRB per kapita yang terus meningkat, serta provinsi di wilayah KTI secara konsisten dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan jauh lebih cepat dibandingkan wilayah di KBI.

172. Terkait dengan pemerataan dan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan, pada tahun 2014 sebanyak 69 kabupaten memiliki potensi untuk keluar dari status ketertinggalannya, pembangunan 26 daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat, peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana prasarana perbatasan di 183 kabupaten, serta peningkatan jalur transportasi ke pulau-pulau kecil dan kapal perintis.

173. Koordinasi antarsektor dan antardaerah dalam pembangunan daerah terus ditingkatkan dan diarahkan pada (1) penataan ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan dalam (a) penggunaan data dan informasi spasial untuk menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat daya saing nasional, serta (b) operasionalisasi Rencana Tata Ruang (RTR) sesuai dengan hierarki perencanaan; serta (2) mengoptimalkan Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam (a) pembentukan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta dengan pengembangan kawasan perkotaan, (b) mewujudkan keterkaitan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah dikembangkan, dan (c) pelaksanaan KAPET untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang kesenjangannya masih tinggi; KPBPB untuk memperluas dan mengembangkan ekonomi berbasis industri manufaktur dan industi logistik; serta KEK untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi.

174. Dalam penataan ruang, capaian yang penting antara lain: (a) telah ditetapkannya 4 peraturan pemerintah, (b) telah ditetapkannya 4 perpres RTR pulau, (c) telah ditetapkannya 5 perpres RTR KSN, (d) telah ditetapkannya 18 RTRW provinsi, (e) telah ditetapkannya 256 RTRW kabupaten, dan (f) telah ditetapkannya 70 RTRW Kota. Adapun dalam optimasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, capaian yang penting antara lain: (a) 2 lokasi KEK pada tahun 2012 yaitu KEK Tanjung Lesung dan KEK Sei Mangkei melalui PP No. 29/2012 dengan zonasi sebagai kawasan pariwisata, (b) penetapan KAPET sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), (c) penetapan rumusan revitalisasi KAPET di 13 kawasan, serta (d) penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) untuk KAPET Pare-pare, KAPET Manado-Bitung; dan KAPET Sasamba.

175. Pembangunan kelautan berdimensi kelautan dalam KIB I dan II terus dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sektoral serta dilaksanakan secara terpadu sebagai kebijakan lintas bidang.

176. Capaian yang penting dalam pembangunan kelautan antara lain: (a) diselesaikan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (b) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara terpadu antar instansi, (c) peningkatan jalur transportasi ke pulau-pulau kecil dan kapal perintis, (d) pendayagunaan pulau-pulau kecil didorong melalui peningkatan penyediaan infrastruktur dan pemetaan potensi, serta (d) peningkatan upaya wawasan bahari melalui penyelenggaraan Sail Bunaken (2010), Sail Wakatobi-Belitong (2011), Sail Morotai (2012) dan Sail Komodo (2013).

177. Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah diarahkan pada: (1) Pemantapan Desentralisasi Serta Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah dan Antar Daerah dengan meningkatkan kualitas hubungan pusat-daerah dan antar daerah menitik beratkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menata pembagian urusan pemerintahan; (2) Perbaikan Tata Kelola Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dengan memperbaiki tata kelola, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta membentuk pemerintahan daerah yang dapat memberikan pelayanan publik yang optimal; (3) dan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah dengan meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dengan meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah.

178. Capaian penting dalam Pemantapan Desentralisasi Serta Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah Dan Antar Daerah antara lain: penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (PP No. 23 Tahun 2011), pemberlakuan kebijakan moratorium (penghentian/pembatasan pemekaran wilayah), evaluasi menyeluruh terhadap DOB yang terbentuk sejak tahun 1999 s/d 2009 dan penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), serta pengkajian terhadap 18.750 perda pada kurun waktu 2010 – triwulan II 2013. Adapun capaian penting dalam Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah antara lain: telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta telah dilakukan fasilitasi penerapan 15 bidang SPM tersebut di daerah. Adapun dalam Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah adalah Pendapatan daerah yang terus meningkat, peningkatan jumlah provinsi dengan penetapan Perda APBD maupun Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu peningkatan, serta peningkatan jumlah daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus WTP .

ISBN 978-979-3764-93-1